



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 37 Volume 10 Maret 2014



Desa Maju Mulyo Kini Terlistriki

Masyarakat Dapat Berpartisipasi Melistriki Indonesia

Listrik Pulau Bali Harus Mandiri

Semua Masyarakat Terlistriki di Tahun 2020

Kesiapan Sektor Energi menghadapi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015

Wamen ESDM Meresmikan Pembangunan PLTA Kayan Kalimantan Utara



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dari Redaksi

Indonesia terus membangun. Memasuki tahun 2014 yang banyak dibilang sebagai tahun politik, sektor ketenagalistrikan tetap membangun untuk melistriki masyarakat. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, naiknya konsumsi listrik dan pesatnya pertumbuhan ekonomi hingga daerah-daerah.

Akhir tahun 2014 ini ditargetkan akan ada penambahan kapasitas listrik sebesar 4.250 MW. Program listrik perdesaan yang membangun jaringan hingga pelosok-pelosok, serta Program Listrik Gratis Untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Nelayan juga terus ditingkatkan. Program bauran energi (energy mix) pun telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Ini bukti bahwa sektor ketenagalistrikan terus mewujudkan misi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kesejahteraan rakyat.

Awal tahun ini, beberapa program ketenagalistrikan diresmikan. Diantaranya adalah peresmian listrik perdesaan di Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman. Selain itu, awal maret lalu Menteri ESDM Jero Wacik meresmikan program listrik perdesaan Provinsi Bali yang dipusatkan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Informasi mengenai program dan peresmian tersebut dapat disimak dalam Buletin Ketenagalistrikan Edisi 37 Volume 10 Tahun 2014 ini.

Simak pula berita seputar Coffee Morning yang digelar Ditjen Ketenagalistrikan setiap bulannya. Dalam coffee morning Januari, DJK sosialisasikan Peraturan Menteri ESDM tentang perizinan ketenagalistrikan. Sebulan berikutnya Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan bidang ketenagalistrikan. Awal maret lalu giliran Rencana Umum Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN yang disampaikan kepada masyarakat luas.

Kami menunggu kiriman artikel dan berita seputar ketenagalistrikan serta saran dan kritik melalui email buletin@djlpe.esdm.go.id.

Selamat membaca.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah, Heru Setiawan, Hinsu Silaen, Ear Marison, Hagni Surendro, Felix Rudianto, Slamet Riyadi, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Pandu Satria Jati, David F Silalahi, Ilham Budi, Elif Doka Marliska, Andi Winarno, Eri Nurcahyanto, Novan Akhiriyanto, Dina Andriani

Penyunting/ Editor

Ernawati, Suwarno, Matilda Parameswari, Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono Agus Supriyadi, Ajat Munajat, Novi Pravitasari, Adar

Sekretariat

Emi Tursilah, Irman Suryana, Efrika Maritho, Rizka Octiwi, Riono Saputra

DAFTAR ISI

Berita

- Capaian Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2013 4
- Wamen ESDM Kunjungi Indonesia Power UPB Bali 5
- Tahun ini Pemerintah akan Tambah Kapasitas Listrik 4.250 MW 5
- Desa Maju Mulyo Kini Terlistriki 6
- Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Membuka Rakernas AKLINAS 8
- Kementerian ESDM Meriahkan Pameran Munas XII Gapensi 9
- Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri The 5th Meeting Of Committee Of The Whole For The AEC 10
- Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakernas PPIL di Yogyakarta..... 12
- Masyarakat Dapat Berpartisipasi Melistriki Indonesia..... 14
- Prosentase Batubara Untuk Pembangkit Listrik Terus Ditingkatkan 15
- Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan PerMen Perizinan Ketenagalistrikan 16
- Pemerintah Indonesia dan India Berpeluang Jalin Kerjasama Ketenagalistrikan 18
- Kementerian ESDM Atur Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 20
- Dirjen Ketenagalistrikan Buka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Bali 22
- Listrik Pulau Bali Harus Mandiri 24
- Pembangunan Pembangkit Listrik Harus Berwawasan Lingkungan 26
- Pemerintah Percepat Pembangunan PLTA 27
- Pemerintah Targetkan 5.700 MW Pembangkit Tiap Tahun 28
- PLTU Pangkalan Susu Beroperasi Tahun Ini 30
- PJU Pintar Hemat Listrik Solo 4,5 MW 31
- Sesditjen Hadiri Ground Breaking Proyek-Proyek MP3EI Sulbar 32
- Semua Masyarakat Terlistriki di Tahun 2020 33
- Wamen ESDM Lakukan Softlaunching Proyek-Proyek Kelistrikan di Batam 34
- Wamen ESDM Meresmikan Pembangunan PLTA Kayan Kalimantan Utara berkapasitas 6.080 MW 46

ARTIKEL

- Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK..... 38
- Resensi Buku Koleksi Perpustakaan DJK 39
- Kesiapan Sektor Energi menghadapi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015 42
- Monitoring Percepatan Pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional tahun 2013..... 48

Alamat Redaksi

Sekretariat Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08,
Kuningan, Jakarta 12950
Telepon/Fax (021) 5225180
Email : buletin@djlpe.esdm.go.id

Capaian Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2013

Penulis : Pandu Satria Jati B



Foto PLTU Suralaya Banten. Dokumentasi DJK.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Jumat (27/12) memberikan penjelasan kepada wartawan pada acara jumpa pers mengenai Kinerja Sektor ESDM Tahun 2013. Dalam pemaparannya, Kementerian ESDM pada tahun 2013 telah membuat landasan pembangunan sektor energi nasional yang dituangkan dalam Catur Dharma Energi. Program ini terdiri dari Tingkatkan Produksi Migas, Kurangi Pemakaian & Impor BBM, Dorong Masif Pengembangan EBT dan Hemat Energi. Menurut Jero Wacik, pada tahun 2013 ini sektor ESDM masih menjadi faktor strategis bagi perekonomian nasional. Selain sebagai penopang utama penerimaan negara dalam APBN, juga memasok kebutuhan energi, bahan baku industri, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi serta mendorong pertumbuhan daerah.

Dalam sub sektor ketenagalistrikan, pencapaian pembangunan pada tahun 2013 adalah tercapainya rasio elektrifikasi yang menembus

angka 80,4 persen. Angka ini melampaui target akhir tahun yang diperkirakan sebesar 79,3%. Pencapaian ini menjadi landasan penting untuk pembangunan sub sektor ketenagalistrikan tahun-tahun mendatang dimana pada tahun 2014 rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 81,5 persen.

Jika pada tahun 2013 ada penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.175 MW sehingga kapasitas terpasang total menjadi 46.428 MW, maka pada tahun 2014 ditargetkan akan ada penambahan sebesar 4.250 MW. Pada tahun 2013 juga telah dilakukan program Listrik Gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan sebanyak 94.230 Rumah Tangga. Program bauran energi (energy mix) telah menampakan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2013 porsi BBM pada pembangkit listrik menjadi 12,60 persen. Bahkan tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 9,70 persen. Sedang porsi batubara tahun 2013 menjadi 51,54 persen dan ditargetkan naik

menjadi 57,24 persen pada 2014. Dalam release yang dikeluarkan Kementerian ESDM, untuk menghadapi liburan akhir tahun penyediaan tenaga listrik dilaporkan dalam kondisi pasokan cukup. Rata-rata daya mampu pembangkit mencapai sebesar 32.476 MW dan beban puncak sebesar 29.791 MW. Kementerian ESDM juga telah dibentuk Satgas dan posko ESDM (Posko Pusat KESDM, Posko Pertamina, Posko BPH Migas, Posko PLN dan Posko Geologi) pada tanggal 22 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 untuk memantau ketahanan energi nasional selama libur natal dan tahun baru. (PSJ)

Wamen ESDM Kunjungi Indonesia Power UPB Bali

Penulis : Pandu Satria Jati B

Jumat (3/1), Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo melakukan kunjungan kerja ke PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali. Dalam kunjungan kerja tersebut Wamen ESDM didampingi para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan diterima oleh Direktur Utama PT. Indonesia Power Supangkat Iwan Santoso, serta para pejabat dan pegawai PT Indonesia Power UPB Bali. Agenda kunjungan tersebut berkaitan dengan ketenagalistrikan yang Pulau Bali.

Supangkat menjelaskan bahwa Pulau Bali memerlukan pembangkit yang lebih efisien. "Kami terus berusaha untuk mendatangkan gas untuk mesin pembangkit

kami yang di Bali", ujarnya kepada Susilo Siswoutomo. Wamen ESDM menanggapi persoalan tersebut sebagai prioritas, "Bali harus ada gas, harus!" tegas beliau. Menurutnya dengan mendatangkan gas ke Bali, maka beban pemerintah terhadap pembelian BBM akan berkurang dan dengan berbahan bakar gas pada mesin pembangkit maka akan lebih ramah Lingkungan.

"Kita akan carikan lokasi untuk memasok gas, itu tugas ESDM dan pemerintah harus dukung ini", lanjut beliau. Pernyataan tersebut tentu disambut suka cita khususnya untuk PT. Indonesia Power dan umumnya untuk PT. PLN (Persero). Menurut Susilo, semua pihak

baik pemerintah pusat, lokal, maupun setiap individu harus mementingkan kebutuhan masyarakat luas untuk mendapatkan listrik yang baik. "Sekarang ini, listrik sudah merupakan kebutuhan pokok bagi kita semua, maka semua harus mendukung", ungkapny.

Wamen ESDM bersama rombongan pun menyempatkan diri ke ruang kontrol PLTG Pesanggaran. Disana, beliau mengucapkan terima kasih kepada operator-operator UPB Bali yang sedang bertugas. "Terima kasih telah menjaga kelistrikan di Bali dan menjaga nama baik Negara kita ini", ujarnya. (PSJ)

Tahun ini Pemerintah akan Tambah Kapasitas Listrik 4.250 MW

Sepanjang tahun 2014 ini Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 4.250 megawatt (MW). Sehingga, pada akhir tahun nanti kapasitas pembangkit listrik nasional bisa mencapai 50.678 MW. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, pada tahun 2013 yang lalu kapasitas pembangkit listrik nasional telah berhasil ditingkatkan menjadi 46.428 MW.

"Artinya, tambahan kapasitas pembangkit listrik pada 2013 yakni 1.175 MW. Tambahan ini lebih rendah dari yang berhasil

dicapai pada 2012 yang sebesar 3.879,2 MW," katanya seperti yang dilansir harian Investor Daily, Jakarta, Jakarta, Senin (6/1). Akan tetapi, tambahnya, pada tahun ini Pemerintah akan menambah kembali kapasitas pembangkit listrik nasional yang ditargetkan akan bertambah sebesar 4.250 MW.

Jarman menjelaskan, tambahan kapasitas pembangkit akan berasal dari proyek pembangkit 10.000 MW tahap pertama, yakni 3.013 MW. Pembangkit tersebut saat ini sudah dalam tahap uji coba (commissioning). Pembangkit itu

harusnya mulai beroperasi pada tahun lalu, namun baru 60% yang sudah beroperasi komersil atau sudah memperoleh sertifikat layak operasi (SLO). (us/id) - PSJ

Desa Maju Mulyo Kini Terlistriki

Penulis : Pandu Satria Jati B



Kepala Desa Maju Mulyo, Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menyalakan listrik untuk pertama kalinya di desa tersebut.

Sabtu (11/1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc meresmikan proyek-proyek listrik perdesaan di Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Didampingi Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo, anggota komisi VII DPR RI Asfihan, perwakilan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati Tanah Baru, Camat Mantewe dan Kepala Desa Maju Mulyo. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Mursalin, beserta jajaran PT PLN (Persero).

Dalam sambutannya Dirjen Ketenagalistrikan mengucapkan selamat kepada warga Desa Maju Mulyo yang saat ini telah menikmati listrik. "Kehadiran saya juga untuk meminta masukan dari

masyarakat mengenai program-program pemerintah khususnya di sektor ketenagalistrikan" ungkap Jarman. Ia juga berpesan agar masyarakat bersama-sama menjaga jaringan listrik yang telah dibangun oleh pemerintah.

Menurut Jarman program listrik perdesaan telah menyumbang

kenaikan rasio elektrifikasi yang signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan jaringan listrik hingga ke pelosok-pelosok telah meningkatkan rasio elektrifikasi dari 67,2% di tahun 2011 menjadi 80, 4% di akhir tahun 2013. Di provinsi Kalimantan Selatan, rasio elektrifikasi pada tahun 2012 sebesar 76,74%, serta



Anggota Komisi VII DPR RI Asfihan menyalami Dirjen Ketenagalistrikan Jarman se usai penandatanganan prasasti peresmian program listrik perdesaan di Desa Maju Mulyo.



Searah jarum jam : Sambutan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sambutan anggota Komisi VII DPR RI Asfihan, prasasti peresmian dan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan.

naik menjadi 80,96% pada tahun 2013. Dirjen Ketenagalistrikan mengapresiasi kinerja semua pihak yang menjadikan rata-rata rasio elektrifikasi Kalsel di atas rata-rata nasional. Jarman juga mengapresiasi kerja sama dengan DPR RI yang telah menaikkan anggaran untuk listrik perdesaan.

Program listrik perdesaan yang diterima masyarakat Maju Mulyo berupa pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Gardu Distribusi, dan program listrik hemat dan murah. Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan dana APBN

Kementerian ESDM. Tahun 2012 anggaran yang dikeluarkan sebesar 52.1 Milyar Rupiah. Anggaran ini naik menjadi 72 Milyar Rupiah di tahun 2013. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 156 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 111 kms, gardu distribusi 73 buah/kapasitas 3,25 MVA, listrik murah dan hemat sebanyak 1.343 RTS.



Sebagian warga Desa Maju Mulyo yang kini mendapatkan listrik melalui program listrik perdesaan APBN Kementerian ESDM.

Selepas menyampaikan sambutan, Jarman menandatangani prasasti peresmian. Ia kemudian menyaksikan pemotongan tumpeng oleh masyarakat di desa tersebut, serta mendampingi Kepala Desa Maju Mulyo untuk menyalakan listrik yang pertama kali di gedung balai desa tersebut. Kehadiran listrik di daerah tersebut disambut dengan bahagia oleh seluruh masyarakat. (PSJ)

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Membuka Rakernas AKLINAS

Penulis : Jackson Frans



Dari kiri ke kanan : Direktur teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menyampaikan sambutan pembukaan Rakernas AKLINAS, penyampaian kenang-kenangan, dan suasana Rapat Kerja Nasional AKI

SERPONG – Selasa (28/1) Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kontraktor listrik Nasional (AKLINAS) di Serpong Banten. Selain dihadiri oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PT PLN (Persero) sebagai pemasok tenaga listrik.

Agoes Triboesono menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi keselamatan ketenagalistrikan. Ia ngatakan bahwa Aklinas yang merupakan salah satu mitra strategis dari pemerintah, diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia yang unggul terutama dibidang usaha penunjang ketenagalistrikan. Hal ini untuk mengantisipasi tenaga ahli asing yang akan masuk ke Indonesia seiring akan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area, sehingga sumber daya

manusia yang dimiliki AKLINAS dapat ikut bersaing dan tidak menjadi “jago kandang”.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa berdasarkan survei yang di lakukan oleh Bank Dunia untuk kemudahan mendapatkan listrik, Indonesia masih di peringkat 147 dari 185 negara yang di survei. Ia berharap bahwa di waktu yang akan datang peringkat Indonesia akan naik dari yang sekarang. Untuk itu pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan PLN untuk meningkatkan peringkat ini

dan diharapkan AKLINAS dapat membantu untuk mewujudkannya.

Diakhir sambutannya Agoes Triboesono mewakili Pemerintah mengharapkan agar Rakernas ini dapat berlangsung dengan sukses sehingga dapat memberikan masukan yang positif bagi Pemerintah dalam rangka pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh indonesia. (JFN)



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono (kedua dari kiri) berfoto bersama pimpinan dan undangan Rakernas AKLINAS 2014 di Serpong, Banten Selasa (28/1).

Kementerian ESDM Meriahkan Pameran Munas XII Gapensi

Penulis : Pandu Satria Jati B



Suasana Stand kementerian ESDM dalam Pameran Munas XII gapensi di Hotel Inna Grand Bali Beach,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (20/1) hingga Rabu (22/1) memeriahkan penyelenggaraan pameran dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) XII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Pameran diselenggarakan berdampingan dengan ruang rapat Munas Gapensi di Hotel Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur Bali. Pameran ini diikuti oleh beberapa instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta, serta dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta Munas dari 33 Propinsi dan 473 Kabupaten di Indonesia. Stan Kementerian ESDM sendiri diikuti oleh unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT PGN, PT Pertamina, dan PT PLN. Munas XIII Gapensi dan pameran

tersebut dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden didampingi Menteri ESDM Jero Wacik juga sempat mengunjungi stan Kementerian ESDM yang disambut oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman. Ia menjelaskan capaian-capaian sektor ESDM, khususnya Catur Dharma Energi yang mejadi tema besar stan yang berukuran 5 x 10 meter ini. Catur Dharma energi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 4051K/07/MEM/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Catur Dharma Energi. Empat poin penting dalam Catur Dharma Energi tersebut ialah : Tingkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kurangi impor Bahan Bakar Minyak, Kembangkan Energi Baru Terbarukan, dan Hemat Energi.

Sesuai dengan tema Catur Dharma Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menampilkan beberapa capaian sub sektor keteagalistrikan hingga akhir 2013 seperti Rasio Elektrifikasi yang mencapai 80,4%, penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.175

MW sehingga kapasitas terpasang total menjadi 46.428 MW, serta informasi mengenai percepatan pembangkit listrik Tahap II yang lebih banyak menggunakan energi baru dan terbarukan. Ditjen Ketenagalistrikan juga terus menyampaikan kampanye penghematan energi, khususnya energi listrik dengan membudayakan menggunakan lampu hemat energi dan mematikan lampu serta peralatan listrik lainnya jika tidak digunakan.

Stan Kementerian ESDM ramai dikunjungi oleh peserta Munas XII Gapensi. Para pengunjung banyak yang menanyakan mengenai pembangunan proyek-proyek energi di sektor migas, mineral dan batubara, serta ketenagalistrikan. Prosedur investasi ketenagalistrikan juga dipamerkan dalam pameran tersebut sehingga para pelaksana kontruksi tertarik untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Pengunjung stan Kemenerian ESDM juga mendapatkan kenang-kenangan dari unit-unit Kementerian ESDM dan BUMN sektor ESDM. (PSJ)



Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri The 5th Meeting Of Committee Of The Whole For The AEC



The 5th Meeting of Committee of The Whole for The AEC di Myanmar yang dihadiri oleh Dirjen ketenagalistrikan selaku SOME Chairman

Nay Pyi Taw, Myanmar.- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc, dalam kapasitasnya sebagai ASEAN Senior Official on Energy Meeting (SOME) Chairman menghadiri pertemuan The 5th Meeting of Committee of the Whole for the ASEAN Economic Community (AEC). Acara ini berlangsung pada Rabu (15/1) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pertemuan tersebut diselenggarakan secara beruntun dengan pertemuan The First Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials for the Forty-Fifth Asean Economic Ministers Meeting (SEOM 1/45) yang berlangsung di tempat yang sama tanggal 13 – 15 Januari 2014.

Sidang dibuka oleh H.E. DR. Lim Hong Hin, Deputi Sekjen ASEAN bidang Komunitas Ekonomi ASEAN yang menyampaikan bahwa pertemuan ini menghadirkan dan memaparkan kemajuan dan capaian masing-masing sektor ekonomi ASEAN, yaitu: perdagangan, energi, pertanian dan kehutanan, keuangan, investasi, mineral, iptek, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata.

Dalam pengantarnya pada pertemuan tersebut, Jarman menyampaikan bahwa kerjasama energi di antara negara anggota ASEAN telah berlangsung lebih dari tiga dekade, dan dalam selang waktu tersebut terjadi pasang surut yang pada dasarnya menempa kerjasama energi menjadi pemahaman yang saling menguntungkan bersama dan saling mendukung. Pertemuan ke 31 para pejabat tinggi energi ASEAN dan pertemuan Para Menteri Energi ASEAN telah berlangsung masing-masing pada bulan Juni dan September 2013 di Bali, Indonesia.

Selanjutnya Jarman menyampaikan pencapaian kerjasama energi ASEAN diukur oleh the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC), di mana APAEC tahap pertama tahun 2004 – 2009. Saat ini APAEC 2010 – 2015 sedang berlangsung, dan telaah tengah-periode atas efektivitas dan manfaatnya telah berlangsung, yang secara garis besar menghasilkan :

1. Skor 3,38 dari 5 yang menunjukkan bahwa kerjasama energi ASEAN masih berada dalam jalur yang tepat untuk memenuhi target tahun 2015 mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC).
2. Kemajuan proyek kerjasama energi yang utama, yaitu inisiasi proyek interkoneksi listrik lintas batas terus berlangsung. Dan
3. Wadah jejaring kerjasama energi terus bekerja keras untuk melaksanakan rekomendasi telaah tengah-periode sesuai bidang masing-masing melalui strategi dan kegiatan yang relevan hingga tahun 2015.

Sejumlah pencapaian penting sektor energi diantaranya:

- Konstruksi 2 (dua) proyek utama interkoneksi dalam ASEAN Power Grid (APG) untuk mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu: Sarawak–West Kalimantan and Peninsular Malaysia-



Dirjen Ketenagalistrikan Jerman menyampaikan pencapaian kerjasama energi ASEAN

Sumatra sedang berlangsung dan diharapkan dapat mulai beroperasi masing-masing pada tahun 2014 dan 2017.

- Instrumen perpanjangan masa berlaku MOU TAGP Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) telah ditandatangani oleh para Menteri Energi ASEAN pada pertemuannya yang ke 31 di Bali, Indonesia, di mana MOU tersebut diperpanjang 10 (sepuluh) tahun hingga 20 Mei 2024.
- Konsep ASEAN Agreement on the Coal Use and Trading (ACUT) dalam sub-sektor Coal and Clean Technology (CCT) sedang dibahas mendalam dan peluncuran ASEAN Coal Awards pertama di bawah ASEAN Energy Awards.
- Di sub-sektor efisiensi dan konservasi energi (Energy Efficiency & Conservation -EE&C), telah tercapai pengurangan 7,56% intensitas energi ASEAN secara umum pada tahun 2010 dari basis tahun 2005; dan nampaknya ASEAN masih di jalur yang tepat untuk memenuhi target pengurangan kolektif 8% pada tahun 2015
- Telah mencapai 29,3% kapasitas terpasang energi

terbarukan (Renewable Energy - RE) pada tahun 2011, melebihi target 15% ASEAN pada tahun 2015.

- Dalam kerangka Regional Energy Policy and Planning (REPP), para Menteri Energi ASEAN pada pertemuannya yang ke 31 telah menyepakati Laporan the Mid-Term Review of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015, dan menyepakati peningkatan kerjasama dengan mitra wicara dan lembaga internasional untuk mendukung kerjasama energi di kawasan ASEAN.
- Telah terlaksana sejumlah workshop peningkatan kapasitas dalam kerangka Civilian Nuclear Energy (CNE), termasuk pengembangan sumber daya manusia dengan dukungan Pemerintah Korea dan Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security oleh Pemerintah Jepang, di mana keduanya merupakan program kerjasama energi ASEAN+3.
- Dan untuk memperkuat dan mendorong kerjasama energi ASEAN, ASEAN Centre for Energy (ACE) sebagai pusat dan penghubung kerjasama.

Protokol untuk memperbaharui kesepakatan pembentukan ACE telah ditandatangani pada pertemuan Menteri Energi ASEAN ke 31 pada bulan September 2013 di Bali, Indonesia.

SOME Chairman juga memaparkan rencana kerjasama energi tahun 2014 mendatang, diantaranya dengan melanjutkan seluruh kegiatan APG, TAGP, AFOC, EE&C, RE, REPP, NEC dan peningkatan ACE.

Di balik pencapaian dan keberhasilan tersebut di atas, kerjasama energi ASEAN juga menghadapi permasalahan dan tantangan, diantaranya:

- Proses harmonisasi standar teknis, kerangka kerja regulator dan hukum khususnya terkait proyek interkoneksi.
- Mobilisasi sumber daya untuk proyek interkoneksi TAGP dan APG.
- Kebutuhan akan tenaga ahli dan teknis yang memadai untuk pelaksanaan inisiatif kerjasama energi termasuk perdagangan energi lintas batas negara.

Sebagai penutup, SOME Chairman menyampaikan langkah tindak lanjut kerjasama energi ASEAN:

- Melanjutkan kerjasama yang erat dengan mitra wicara dan lembaga internasional untuk secara bersama melaksanakan inisiatif kerjasama energi APG dan TAGP.
- Meningkatkan peranan sektor swasta melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP).
- Selanjutnya, sidang menyepakati pertemuan berikutnya akan berlangsung di Malaysia. (RBS)

Penulis : Ridwan Budi Santoso

Dirjen Ketenagalistrikan Buka Rakernas PPILN di Yogyakarta

Penulis : Jackson Frans



Dirjen Ketenagalistrikan sampaikan sambutan dalam Rakernas PPILN di Yogyakarta.



Rakernas PPILN dihadiri pula Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Harry Jaya Pahlawan (dua dari kanan).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc pada Selasa (28/1) malam membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) di Yogyakarta. Rakernas ini dihadiri pula oleh Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Harry Jaya Pahlawan, perwakilan

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, para pimpinan asosiasi-asosiasi ketenagalistrikan, serta peserta Rakernas PPILN dari seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya Jarman menyambut baik pelaksanaan Rakernas PPILN ini serta terus mendukung PPILN dalam membantu pemerintah melistriki

masyarakat, khususnya dalam pemeriksaan dan pengujian serta menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Menurutnya saat ini sinergi antara Pemerintah, PLN selaku pemasok tenaga listrik, inspeksi tenaga listrik, dan asosiasi ketenagalistrikan sudah berjalan cukup baik. "Yang diuntungkan dalam sinergi yang baik ini adalah



Rakernas PPILN dihadiri oleh para pimpinan asosiasi-asosiasi ketenagalistrikan, serta peserta Rakernas PPILN dari seluruh Provinsi di Indonesia.



PPILN bertekad memangkas jarak tempuh yang selama ini menghambat penerbitan SLO.

masyarakat,” ujarnya. Dengan sinergi yang baik ini, menurutnya tingkat kemudahan masyarakat untuk mendapatkan listrik (getting electricity) meningkat. Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa tanggal 9 Desember lalu, telah tercapai kesepakatan antara pemerintah, PLN, lembaga inspeksi, instalatur dan asosiasi ketenagalistrikan. Salah satu isi dari kesepakatan tersebut adalah bahwa akhir tahun 2014, lembaga instalasi sudah ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kemudahan mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), masyarakat dapat mendapatkan listrik paling lama 40 hari kerja. Menurut Jarman keselamatan tenaga listrik menjadi prioritas dalam penyambungan listrik kepada masyarakat. Dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur keselamatan ketenagalistrikan tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga terus menyiapkan dan menambah

jumlah inspektur ketenagalistrikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan yang siap mengawal keselamatan ketenagalistrikan. “Di tingkat pusat, tahun ini kami menambah lagi jumlah inspektur ketenagalistrikan dari pegawai baru,” ujarnya. PPILN selaku lembaga yang menerbitkan asosiasi siap mendukung program pemerintah dalam memberikan keselamatan ketenagalistrikan dan mempermudah masyarakat mendapatkan listrik. Ketua umum PPILN Edi Sayudi menyampaikan bahwa saat ini PPILN sudah menerapkan sistem online dalam penerbitan SLO. Dengan sistem online tersebut, PPILN bertekad memangkas jarak tempuh yang selama ini menghambat penerbitan SLO. (PSJ)



Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Harry Jaya Pahlawan dalam pembukaan Rakernas PPILN Selasa (28/1).

Masyarakat Dapat Berpartisipasi Melistriki Indonesia

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjawab pertanyaan dari Majalah Interview Plus.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melistriki Indonesia, yaitu dengan tidak keberatan untuk memotong tanaman yang dilewati jaringan distribusi listrik. Dengan partisipasi memotong batang pohon yang dilewati jaringan distribusi listrik tersebut jaringan listrik dapat segera sampai ke masyarakat yang belum mendapatkan listrik. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc pada saat menjawab pertanyaan wartatv.com di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan Jakarta, Jumat (28/2).

Dalam wawancara tersebut Jarman menyampaikan bahwa pemerintah telah melampaui target RPJMN 2010-2014 yaitu 80% Rasio Elektrifikasi di tahun 2014. "Di akhir tahun 2013 yang lalu telah tercapai rasio elektrifikasi 80,5%" ujarnya. Menurut Jarman hal tersebut terjadi karena masuknya beberapa pembangkit listrik Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tahap I ke jaringan listrik. Selain

itu target tersebut tercapai karena pendanaan APBN yang cukup setiap tahunnya untuk membangun jaringan listrik yang mampu menjangkau daerah-daerah remote. "Target kita rasio elektrifikasi kita mencapai 99,9% tahun 2020, dengan catatan alokasi APBN untuk infrakstruktur ketenagalistrikan harus tetap ada," ujarnya. Alokasi itu diharapkan dapat diambilkan dari pengurangan alokasi subsidi energi.

Selain merelakan tanaman yang dilewati jaringan listrik untuk dipotong, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berhemat listrik. Menurut Jarman, membangkitkan listrik 5MW lebih susah dan mahal jika dibandingkan dengan menghemat listrik 5MW. Menghemat listrik dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan serta mematikan lampu dan AC jika meninggalkan ruangan. Kembali partisipasi masyarakat untuk kemajuan infrakstruktur listrik

dapat dilakukan dengan cara yang sederhana.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan juga memaparkan realisasi penggunaan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik. Hingga akhir tahun 2013, bauran energi untuk pembangkit listrik didominasi batubara sebesar 51,58% dan diikuti oleh gas sebesar 23,56%. Porsi BBM juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,54%. "Porsi BBM ini dari tahun ke tahun trennya terus menurun seiring dengan beroperasinya pembangkit baru Non-BBM<" ungkap Jarman. Adanya proyek 10.000 MW tahap I yang semuanya menggunakan batubara, menurut Jarman mengakibatkan batubara menjadi sumber energi yang dominan digunakan saat ini. "Pembangkit berbahan bakar batubara bianya relatif murah dan Indonesia memiliki sumber batubara yang cukup banyak," ungkapnya. (PSJ)

Prosentase Batubara Untuk Pembangkit Listrik Terus Ditingkatkan

Pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari bahan bakar batubara. Target pemerintah adalah 65% penggunaan batubara di tahun 2020 nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat diwawancarai oleh Nippon Hoso Kyokai (NHK) Jepang pada Senin (3/2).

Menurut Jarman, terdapat tiga alasan mengapa pemerintah mengejar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar primer batubara. Alasan pertama adalah sumber batubara yang banyak di Indonesia, alasan kedua adalah listrik dari batubara adalah yang termurah dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, sedangkan alasan ketiga adalah dengan kemajuan teknologi emisi dari batubara bisa ditekan sehingga lebih ramah lingkungan.

Menurut Jarman kebutuhan listrik setiap tahun selalu meningkat. Setiap tahun Indonesia membutuhkan 5.000 MW dari

pembangkit-pembangkit listrik “Listrik tidak boleh berlebih, namun juga tidak boleh kurang,” ujar Jarman. Menurutnya pertumbuhan listrik paralel dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sekitar 6% setiap tahunnya. Oleh karena itu menurut Jarman kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali harus dijaga keseimbangan pasokannya karena telah cukup. Namun di luar Jawa Bali kebutuhan listrik masih kurang, sehingga pasokan listrik harus dikejar. Menurutnya investasi untuk listrik dari Pemerintah dan PLN hanya dapat mencukupi 50%. “Sisanya pemerintah mengharapkan keterlibatan pihak swasta,” ujarnya.

Menurut Jarman penggunaan bahan bakar batubara di Indonesia saat ini sekitar 51%. Prosentase ini akan meningkat menjadi sekitar 65% di akhir tahun 2020. Di saat yang sama, pemakaian BBM dalam bauran energi primer akan dihilangkan. Sesuai kebijakan energi yang ada di Indonesia, penggunaan energi setempat termasuk batubara akan digalakkan. Pemerintah mengejar

pembangunan PLTU mulut tambang dalam pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik.

Salah satu kerugian dari penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik adalah emisi yang tinggi. Namun menurut Jarman saat ini telah ada clean coal technology. Teknologi ramah lingkungan ini dapat mengurangi emisi yang dihasilkan oleh PLTU berbahan bakar batubara sehingga lebih ramah lingkungan.

Rasio elektrifikasi dan pemakaian listrik perkapita menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pasokan listrik. Akhir tahun 2013 menurut Jarman konsumsi Kwh/Kapita Indonesia mencapai 920 Kwh/Kapita. Akhir tahun ini diprediksi mencapai 1.000 Kwh/Kapita. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hidup tanpa listrik. “Pembangkit listrik yang besar dan cepat itu hanya dapat dilakukan oleh Batubara”, ujarnya. (PSJ)

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman saat diwawancarai oleh Televisi NHK Jepang, Senin (3/2).

Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan PerMen Perizinan Ketenagalistrikan

Penulis : Pandu Satria Jati B



Coffee Morning Sosialisasi PerMen Perizinan Ketenagalistrikan, Jumat (17/1) menghadirkan Dr Aviliani (kiri) sebagai pembicara.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada Jumat (17/1), menyelenggarakan Coffee Morning dengan Tema Peluang dan Peran Investasi Swasta dalam Sektor Ketenagalistrikan. Acara ini mensosialisasikan tiga Peraturan Menteri (Permen) ESDM terbaru yaitu Permen ESDM Nomor 35

Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika, dan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas

Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, acara ini penting untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, PT PLN, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di sektor ketenagalistrikan," ujar Dirjen.

Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra, Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 mengatur mengenai tata cara perizinan untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha



Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, acara Coffee Morning penting untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, PT PLN, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan



Coffee Morning Sosialisasi PerMen Perizinan Ketenagalistrikan dihadiri para pembangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dengan skema untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri. Selain itu Permen ini mengatur pula tatacara perizinan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi jasa konsultasi, pembangunan dan pemasangan,

pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan, pengoperasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian, sertifikasi produk peralatan listrik, sertifikasi tenaga teknik dan sertifikasi badan usaha.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanita menyampaikan sosialisasi PerMen Perizinan Ketenagalistrikan.

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2013, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan tentang tatacara pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika (Telematika) tanpa mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik dengan memanfaatkan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan, serat optik, konduktor dan kabel pilot. Agoes juga memaparkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013. "Pada prinsipnya kompensasi diberikan tanpa melepaskan hak kepemilikan atas tanah, bangunan dan tanaman," ujarnya. Menurut peraturan tersebut, penilaian harga pasar atas tanah, bangunan dan tanaman dilakukan pihak independen. Berdasarkan penilaian tersebut, dimasukan ke dalam formula penghitungan kompensasi yang ditetapkan. Dengan menggunakan skema tersebut, besaran nilai kompensasi yang diterima masyarakat akan lebih baik dari besaran nilai kompensasi sebelumnya.

Dr Aviliani selaku pengamat ekonomi memaparkan materinya mengenai Proyeksi Ekonomi Indonesia 2014 dan Kondisi Kelistrikan Indonesia. Ia memotivasi para pengusaha yang hadir untuk tidak ragu-ragu melakukan investasi di tahun 2014 ini. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat pasti membutuhkan kebutuhan listrik yang cukup besar. Kebutuhan listrik dan kebutuhan tata ruang harus disinkronkan. Pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan PLN dan swasta disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi. "Jika peran swasta meningkat, kita tidak akan pernah kekurangan listrik," ujarnya. (PSJ)

Indonesia dan India Berpeluang Jalin Kerjasama Ketenagalistrikan

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman bersama dengan anggota India Bussines Forum (IBF) -Atas. Pembukaan 'Realising Indonesia Power Vision : Building Partnership with India' -Tengah Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan speech dalam pembukaan seminar - Bawah.

Republik Indonesia dan Republik India memiliki peluang dalam menjalin sinergi dan kerja sama dalam sub sektor ketenagalistrikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kesempatan bagi investor dari luar negeri untuk bersama-sama membangun ketenagalistrikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc dalam Seminar 'Realising Indonesia Power Vision : Building Partnership with India'. Seminar yang diselenggarakan oleh Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) bekerjasama dengan India Bussines Forum (IBF) diselenggarakan Kamis (13/2) di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta.

Dalam keynote addressnya, Jarman menyampaikan Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Peluang Investasi di Indonesia. Ia memaparkan kondisi ketenagalistrikan di Indonesia, kondisi umum pembangkit listrik, target bauran energi, rasio elektrifikasi, serta optimisme Pemerintah Republik Indonesia dalam mengurangi emisi dalam pembangkitan tenaga listrik.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan juga memaparkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Pembangunan ketenagalistrikan dibagi ke dalam enam koridor ekonomi yaitu koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku," ujar Jarman. Dalam MP3EI ini pemerintah Indonesia membuka



Seminar yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot ini dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Gurjith Singh.

akses kepada negara-negara sahabat untuk berinvestasi dalam pembangunan di Indonesia, salah satunya dalam sub sektor ketenagalistrikan.

Senada dengan Jarman, Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur pamudji menyampaikan adanya empat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh investor-investor luar negeri, termasuk India, dalam berinvestasi ketenagalistrikan di Indonesia. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam membangun fasilitas

dalam peralatan ketenagalistrikan khususnya dalam medium voltage dan high voltage, yang kedua adalah membangun Independent Power Porducer (IPP), yang ketiga adalah berpartisipasi dalam membangun pembangkit listrik dalam kawasan industri yang terakhir adalah berpartisipasi dalam proyek-proyek Engineering, Procurement and Contrution (EPC) dari PT PLN (Persero).

Seminar ini dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia, ASEAN

dan Timor Leste, Gurjith Singh. Ia berharap seminar ini memepererat hubungan kerja sama kedua negara dalam sektor energi. Dirjen Ketenagalistrikan juga berharap acara ini mampu memberikan informasi untuk menguatkan jalinan kerja sama antara Indonesia dan India. Jarman berharap pertemuan ini menghasilkan suatu aksi nyata dalam membangun ketenagalistrikan di Indonesia melalui hubungan kerja sama yang baik. (PSJ)



Dirjen Ketenagalistrikan berharap acara ini mampu memberikan informasi untuk menguatkan jalinan kerja sama antara Indonesia dan India.

Kementerian ESDM Atur Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrkan

Penulis : Pandu Satria Jati B

Setiap Instalasi Tenaga Listrik harus terakreditasi dan tersertifikasi. Penyediaan tenaga listrik harus andal, aman, dan ramah lingkungan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman dalam Coffee Morning, Jumat (14/2) di Kantor Ditjen Ketenagalistrkan, Kuningan, Jakarta. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrkan, maka Menteri ESDM melakukan akreditasi terhadap Lembaga Inspeksi Teknik (LIT), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Berdasarkan Peraturan Menteri turunan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tersebut, LIT dapat melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), LSK akan melakukan sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrkan dan menerbitkan Sertifikat Kompetensi



Coffee Morning Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrkan dihadiri oleh ratusan peserta.

Tenaga Teknik (SKTT) dan LSBU melakukan sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Menurut Jarman, sesuai peraturan ini maka PLN sebagai pilihan terkahir dapat melakukan sertifikasi instalasi tegangan rendah. “Sehingga tidak ada lagi instalasi tenaga listrik yang dioperasikan tanpa mendapat sertifikat laik operasi,” ujar Jarman.

Dalam peraturan ini, secara resmi

diatur prosedur mendapatkan listrik dipersingkat dari 120 hari menjadi 40 hari. “Biaya juga turun 40% dari biaya semula, prosedur dipersingkat menjadi 3 prosedur yang semula 6 prosedur,” ungkap Jarman.

Dengan diberlakukannya dan diterapkannya Peraturan Menteri ESDM ini berarti kita telah menindaklanjuti salah satu tantangan di sektor ketenagalistrkan antara lain survei yang dilakukan oleh World Bank tentang “Getting Electricity”. Dengan menerapkan penyederhanaan prosedur mendapatkan tenaga listrik, diharapkan peningkatan peringkat “Getting Electricity” Indonesia yang semula berada pada peringkat 121 akan menjadi lebih baik lagi pada tahun depan.

Dalam coffee morning tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrkan Agoes Triboesono memaparkan Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrkan. Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PLN Moch



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrkan memaparkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrkan.

Harry Jaya Pahlawan memaparkan Pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero). Terakhir, Rektor Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN Supriadi Legino menyampaikan paparan tentang Manfaat Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Menghadapi Lingkungan Global. Dengan Coffee Morning ini, pemerintah memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. (PSJ)



Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, tidak ada lagi instalasi tenaga listrik yang dioperasikan tanpa mendapat sertifikat laik operasi.

Galeri Foto Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan Jumat, 14 Februari 2014



Dirjen Ketenagalistrikan Buka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Bali

Penulis : Jackson Frans



Dirut PT PLN Nur Pamudji menyampaikan sambutan dalam Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Jawa Bali.



Dirjen ketenagalistrikan akan menindak tegas setiap pencurian listrik.

Rabu (5/3) bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman membuka Workshop Upaya Penurunan Susut jaringan Tenaga Listrik Dalam rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik Wilayah Jawa-Bali. Melalui acara yang digagas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan bekerjasama dengan Pusdiklat

PT PLN diharapkan susut (losses) jaringan tenaga listrik akan turun secara bertahap.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menyampaikan bahwa Jawa-Bali

merupakan penghasil terbesar tenaga listrik di Indonesia. Sistem Jawa-Bali mendominasi penjualan listrik PLN yaitu hampir mendekati 75% dari penjualan listrik nasional. Selain mendominasi penjualan listrik, sistem Jawa-Bali juga menjadi penyumbang terbesar losses secara nasional. Oleh karena itu Jarman mengungkapkan, "secara pareto, kalau kita bisa



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra (kiri) dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji (kedua dari kanan) menyampaikan bahwa Jawa-Bali merupakan penghasil terbesar tenaga listrik di Indonesia, untuk itu harus dijaga dari pencurian listrik..



menyelesaikan masalah losses di Jawa-Bali sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan hampir semua masalah losses yang ada di Indonesia”.

Dirjen Ketenagalistrikan mengharapkan peran aktif PT PLN (Persero) melalui manager area untuk menurunkan losses. “kunci utama penurunan losses adalah di area manager beserta perangkatnya untuk mengetahui sistem jaringan”, ujar Jarman. Hal ini untuk dapat mengidentifikasi mana jaringan yang sudah rusak dan mana yang masih baik, sehingga dapat diperbaiki dengan cepat. Hal non teknis lain yang dapat menyebabkan besarnya losses adalah pencurian listrik. Untuk mengurangi losses yang diakibatkan pencurian listrik, dirjen mengharapkan para petugas di area untuk melaporkan pencurian listrik yang ada di wilayahnya guna di tindak lanjuti secara perdata maupun pidana. Untuk ranah pidana, Ditjen Ketenagalistrikan akan menurunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjutinya.



Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji berpesan kepada petugas dilapangan agar melaksanakan dua hal guna menurunkan losses yang ada. Pertama dengan mengenali aset yang dimiliki, sehingga tahu mana alat yang masih baik dan yang sudah rusak. Kedua yaitu “care” dengan cara memiliki program kerja yang baik dan militan untuk melakukan program yang direncanakan, tidak hanya wacana diatas kerja. Hal ini untuk mengamini apa yang dikatakan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dalam sambutannya. (JFN)



Atas : Dirjen ketenagalistrikan dan Dirut PLN tengah berdiskusi untuk menurunkan losses di Jawa-Bali.

Tengah : Acara ini dihadiri oleh perwakilan PLN dari beberapa wilayah di Jawa dan Bali.

Bawah : Suasana Workshop Penurunan Susut Jaringan tenaga Listrik Jawa Bali, rabu (5/3).

Listrik Pulau Bali Harus Mandiri

Penulis : Pandu Satria Jati B

Listrik di Pulau Bali harus mandiri, tidak tergantung dari Pulau Jawa lagi. Untuk itu Pemerintah terus berupaya menambah kapasitas pembangkit listrik di Pulau Dewata tersebut. Tahun ini, sekitar 420 MW kapasitas listrik akan masuk sistem Bali dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang Fase Pertama. Total kapasitas PLTU fase pertama dan kedua nanti ditargetkan sebesar 850 MW. Dengan masuknya kapasitas PLTU terbesar di Pulau Bali tersebut, sistem kelistrikan Pulau Bali dapat mandiri tidak bergantung lagi dari kabel bawah laut Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik pada saat meresmikan program-program listrik perdesaan Provinsi Bali yang dipusatkan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Selasa (18/3). Menurut Jero Wacik, program listrik perdesaan yang dianggarkan dari APBN Kementerian ESDM telah membangun jaringan-jaringan listrik hingga ke pelosok desa sehingga masyarakat yang belum mendapat listrik dapat menikmati listrik. "Desa-desa dan dusun-dusun punya hak untuk mendapat listrik," ungkapnya.

Rasio Elektrifikasi di Bali hingga akhir tahun 2013 dilaporkan mencapai 78%. Wacik berharap bahwa akhir tahun 2014 ini, 80% rumah tangga di Bali telah teraliri listrik. Program listrik perdesaan yang dianggarkan Rp. 2,7 Triliun pada tahun 2013 untuk seluruh Indonesia telah menyumbang kontribusi yang besar dalam peningkatan rasio elektrifikasi. Untuk Provinsi Bali sendiri dianggarkan 83,5 Milyar pada tahun 2013 lalu. Anggaran ini



Atas : Menteri ESDM Jero Wacik menandatangani prasasti peresmian program Lisdes Provinsi Bali TA 2013.

Tengah : Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan laporan program Lisdes Provinsi Bali TA 2013.

Bawah : Para penari tradisional Bali menyambut kedatangan Menteri ESDM dan rombongan di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

digunakan untuk membangun JTM sepanjang 89,9km. JTR sepanjang 294 km, membangun gardu distribusi 66 buah, serta memasang instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 577 RTS. Menurut Dirjen ketenagalistrikan Jarman, kapasitas pembangkit listrik di pulau bali saat ini mencapai 559 MW. Beban puncak di bali mencapai 662 MW. Untuk itu saat ini pulau bali masih mendapat pasokan listrik dari pulau jawa sebesar 180 MW. Jarman melaporkan bahwa Kabupaten Buleleng yang menjadi tempat dikonsentrasikannya peresmian program lisdes di provinsi Bali karena anggaran untuk Kabupaten Buleleng mencapai 40% dari total anggaran Provinsi Bali. "Kenaikan rasio elektrifikasi kabupaten Buleleng naik 4,3 %. Hal ini ditas rata-rata kenaikan rasio elektrifikasi nasional yang sekitar 3,5%," ungkapnya.

Peresmian program-program listrik perdesaan ini dihadiri oleh ratusan warga Kabupaten Buleleng, Wakil Bupati Buleleng, Wakil Kepala Polda Bali, para pejabat di Kementerian ESDM, serta jajaran PLN Distribusi Bali. Menteri ESDM berharap program listrik perdesaan yang sangat bermanfaat ini dapat dilaksanakan terus setiap tahun dengan anggaran yang terus bertambah. (PSJ)



Atas : Menteri ESDM Jero Wacik usai menyampaikan sambutan memainkan alat musik tradisional Bali.

Tengah : Wakil Bupati Buelelng menyambut baik program pemerintah pusat melistriki wilayahnya.

Bawah : Suasana peresmian program lisdes provinsi Bali TA 2013, Selasa (18/3).

Pembangunan Pembangkit Listrik Harus Berwawasan Lingkungan

Penulis : Pandu Satria Jati B

Setiap pembangkit listrik yang dibangun di Indonesia harus berwawasan lingkungan. Investor yang ingin membangun pembangkit listrik diwajibkan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar pembangkit listrik tersebut. Untuk itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Japan International Cooperation Agency menggelar workshop “Introduction to the Power Planning And Policy Simulation Under Study on Pathways to Low Carbon Efficiency in ASEAN”. Acara ini digelar di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta. Dalam workshop yang diselenggarakan Kamis (20/2) hingga Jumat (21/2) tersebut para peneliti dari Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) memaparkan hasil studinya untuk ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Hadir dalam workshop tersebut Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan, Kementerian Koordinator Perekonomian Emy Perdanahari, Perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta PT PLN (Persero). Acara sendiri dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Penyiapan Program Tenaga Listrik Wanhar. Dalam sambutannya yang mewakili Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar mengapresiasi IEEJ dan JICA yang terus memberikan dedikasi bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia dalam meningkatkan ketahanan energi



Suasana Workshop Introduction to the Power Planning And Policy Simulation Under Study on Pathways to Low Carbon Efficiency in ASEAN

dan pembangunan berkelanjutan. “Energi adalah unsur fundamental dan tulang punggung kegiatan ekonomi, “ ujar wanhar. Menurutnya pembentukan struktur energi yang optimal sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Wanhar berharap acara ini memperluas wawasan dan pengetahuan para peserta workshop. “Berbagi informasi kunci, pengetahuan dan pengalaman dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya. Workshop hari pertama lebih menggambarkan hasil kajian IEEJ tentang rendah karbon dan efisiensi energi ASEAN, khususnya informasi yang harus diketahui oleh pemerintah Indonesia. Pada hari kedua IEEJ akan mendorong dan menunjukkan simulasi yang dapat dipilih pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan energi rendah karbon.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia. Pembangunan, khususnya

pembangkit listrik harus diteruskan untuk memenuhi hajat hidup manusia, namun harus dalam prinsip berwawasan lingkungan. Di subsektor ketenagalistrikan, kebijakan tentang lindungan lingkungan telah tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pasal 2 Ayat (1), “Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas kelestarian fungsi lingkungan; dan Ayat (2), “Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” Pasal 42 juga menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. (PSJ)

Pemerintah Percepat Pembangunan PLTA

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dari kiri ke kanan : Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Dirut PT PLN Nur pamudji, Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan mempercepat pemanfaatan air untuk sumber daya Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA). Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo dalam Breakfast Meeting yang dihadiri para pejabat kementerian terkait, di Jakarta Rabu (19/2). Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra.

Pemerintah telah menyiapkan empat program untuk mempercepat pemanfaatan sumber daya air untuk sumber daya PLTA. Program pertama adalah pembangunan PLTA Karangates IV & V, Kesamben, dan

Lodoyo. Empat PLTA yang memiliki total kapasitas sebesar 146,52 MW direncanakan dibangun di tiga waduk yang berada di Provinsi Jawa Timur. Program kedua yang disiapkan pemerintah adalah pengembalian kapasitas mampu PLTA yang mengalami derating ke kapasitas terpasang melalui pengerukan (dredging) dan/atau refurbishment komponen PLTA. Pemerintah akan mengeruk empat waduk dan melaksanakan refurbishment untuk dua waduk sehingga kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan. Program ketiga yang akan

dijalankan pemerintah adalah rapid assessment potensi kapasitas PLTA dari 239 waduk milik Kementerian PU. Untuk program ini diperlukan berbagai studi sehingga didapatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik yang maksimal. Program terakhir yang dilaksanakan pemerintah adalah membantu percepatan perizinan pembangunan waduk-waduk dan PLTA yang sedang berjalan. Sebagai informasi, tujuh PLTA yang akan dan sedang dibangun pemerintah berkapasitas 1377 MW, sedangkan lima PLTA yang dibangun swasta namun memanfaatkan waduk PU eksisting berkapasitas 16,94 MW. Untuk empat PLTA yang akan segera dibangun, Wakil Kepala Bappenas menjelaskan bahwa dari rencana pembangunan, empat PLTA ini dapat dilaksanakan ground breaking pada pertengahan hingga akhir tahun 2014 ini. "Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memudahkan perizinan dan pembangunan keempat PLTA tersebut, sekaligus mencari solusi dari beberapa hambatan yang mungkin terjadi termasuk pendanaannya," ujarnya.(PSJ)



Pertemuan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra.

Pemerintah Targetkan 5.700 MW Pembangkit Tiap Tahun

Penulis : Pandu Satria Jati B



Anggota Dewan Energi nasional memeparkan Paradigma Baru Kebijakan Energi Nasional Menuju Ketahanan Dan Kemandirian Energi dalam Coffee Morning DJK, Jumat (21/3).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang cukup tinggi, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik rata-rata 5.700 MW per tahun. "Pertumbuhan demand (kebutuhan listrik) cukup tinggi yaitu sekitar delapan hingga sembilan persen per tahun, untuk itu pembangkit berbahan bakar batubara merupakan solusi," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam acara coffee morning yang diselenggarakan di kantor Ditjen

Ketenagalistrikan di Kuningan Jakarta, Jumat (21/3). Menurutnya, 67% bauran energi untuk pembangkit listrik di Indonesia di tahun 2022 berasal dari batubara. Tapi Jarman berpesan bahwa pembangunan tersebut harus berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kebijakan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Jarman menyampaikan kepada para stakeholder di sub sektor ketenagalistrikan bahwa sesuai

dengan UU Ketenagalistrikan, Menteri ESDM Jero Wacik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 4092 K/21/MEM/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2013 s.d. 2022. Dalam acara tersebut Ditjen Ketenagalistrikan mengundang Tumiran, anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan untuk menyampaikan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan ketahanan energi, khususnya energi listrik di Indonesia. "Selain ketahanan pangan, ketahanan energi adalah hal yang sangat penting," ujarnya. Dengan adanya KEN yang baru, sektor ketenagalistrikan akan membuat RUKN 2014-2033. Dari RUKN tersebut dibuatlah RUPTL yang diupdate setiap tahun berdasarkan kondisi perkiraan demand dan suply. "RUPTL PLN tahun 2013-2022 yang disosialisasikan hari ini mengacu pada draft RUKN 2012-2031," ujar Jarman. Menurut Jarman, yang



Dirje Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa RUPTL PLN tahun 2013-2022 yang disosialisasikan dalam Coffee Morning ini mengacu pada draft RUKN 2012-2031



Salah satu peserta Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan tanyakan kebijakan soal rencana Ketenagalistrikan.

perlu diperhatikan dari RUPTL yang baru adalah unallocated demand, yaitu demand yang harus dipasok, dengan skema lain atau tidak dari PLN maupun IPP.

Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN Murtaqi Syamsuddin menjadi narasumber pertama dalam diskusi pagi itu. Ia menyampaikan rangkuman RUPTL PT PLN (Pereseo) 2013-2022. Dalam paparannya, Murtaqi menyampaikan bahwa proyeksi kebutuhan tenaga listrik menurun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8,4%. "Penambahan fasilitas ketenagalistrikan mengalami kenaikan dengan tambahan kapasitas pembangkit mencapai 60 GW dibandingkan pada RUPTL sebelumnya sebesar 57 GW," ujar

Murtaqi. Ia juga menyampaikan bahwa transmisi listrik mengalami perubahan target dari 55 ribu kms menjadi 58 ribu kms, trafo GI dari 122 ribu MVA menjadi 134 ribu MVA.

Tumiran yang menjadi narasumber kedua menyampaikan paparan dengan tema Paradigma Baru Kebijakan Energi Nasional Menuju Ketahanan Dan Kemandirian Energi. Ia menyampaikan kepada peserta coffee morning bahwa kemandirian energi merupakan tujuan yang harus didukung bersama. Tumiran bersama anggota DEN yang diketuai oleh Presiden RI sepakat bahwa Sumber Daya Energi tidak diposisikan sebagai komoditas tapi ditempatkan sebagai Aset Pembangunan Nasional. (PSJ)



Foto-foto suasana Coffee Morning DJK tentang Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik yang diselenggarakan pada Jumat (21/3). Acara ini dihadiri ratusan pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.



Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN Murtaqi Syamsuddin menyampaikan rangkuman RUPTL PT PLN (Persero) 2013-2022.

PLTU Pangkalan Susu Beroperasi Tahun Ini

Penulis : Pandu Satria Jati B



PLTU Pangkalan Susu (200 MW) yang ditargetkan masuk ke sistem kelistrikan Sumatera tahun ini.



Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PT PLN meninjau pembangunan PLTU Pangkalan Susu.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu (200 MW) ditargetkan masuk ke sistem kelistrikan Sumatera pada akhir tahun ini. PLTU Pangkalan Susu Unit II dijadwalkan Commercial Operations Date (COD) bulan Oktober, sedangkan Unit I akan COD bulan Desember 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Manager Proyek PLTU Pangkalan Susu, Hamansyah Purba, saat menyampaikan laporan kemajuan pembangunan PLTU Pangkalan Susu kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Jarman M.Sc. Laporan progres PLTU Pangkalan Susu tersebut disampaikan pada saat kunjungan kerja Dirjen Ketenagalistrikan di PLTU yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (19/3). Hamansyah optimis PLTU Pangkalan Susu segera beroperasi dan mampu mencukupi kebutuhan listrik di Pulau Sumatera. "Saat ini progres kedua unit itu mencapai 97%," ujarnya. Dalam kunjungannya, Dirjen Ketenagalistrikan didampingi oleh Direktur Utama PT PLN (Persero)

Nur Pamudji, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra, serta para pejabat di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). Kunjungan ini dilakukan sesuai rapat kerja bersama Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dengan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten II, Bupati Toba Samosir, Bupati Asahan, Kementerian Kehutanan, BPKP dan instansi lainnya di Kantor PT PLN UIP 2. Rapat tersebut membahas krisis listrik dan penyelesaian permasalahan PLTA Asahan III di Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jarman berharap persoalan-persoalan di PLTU Pangkalan Susu dapat segera ditemukan solusinya sehingga dapat segera masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara. Beberapa persoalan PLTU Pangkalan Susu yang disampaikan dalam kunjungan tersebut diantaranya terlambatnya backfeeding Jaringan Transmisi 275 kV yang berpengaruh terhadap jadwal commissioning dan COD, serta adanya permasalahan lahan .

Menurut Hamansyah, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperlancar pembangunan PLTU Pangkalan Susu tersebut. Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya melakukan backfeeding 20/6 kV dari SUTM 20 kV dari S/S Brandan untuk dilakukan commissioning sebagian peralatan, mempercepat konstruksi transmisi 275kV oleh UIP II, menyelesaikan kepemilikan tanah di tingkat Pengadilan, melakukan modifikasi design Ashyard, serta melakukan evaluasi sesuai kontrak. Menurutnya PT PLN (Persero) juga telah melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan warga di kecamatan yang terletak 120 km dari kota Medan itu. Diantaranya penyerahan bantuan CSR, sunatan massal & pengobatan gratis, sosialisasi PLTU dan pengerukan, penyiraman jalan, kompensasi kerusakan rumah, serta perbaikan jalan. (PSJ).

PJU Pintar Hemat Listrik Solo 4,5 MW



Penerangan Jalan Umum Pintar di Kota Solo menghemat konsumsi listrik di kora itu.

SOLO – Pemakaian Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar di kota Solo diyakini dapat menghemat listrik hingga 4,5 MW. Sistem penerangan yang terkontrol terpusat dan aptif terhadap waktu dan cuaca membuat energy yang dikonsumsi PJU Pintar lebih efisien. Efisiensi diperoleh melalui peredupan atau dimming sesuai kebutuhan serta mencegah rugi daya non teknis.

“ Ada beberapa keuntungan yang didapat dari penerapan PJU Pintar, kalau semua 17.000 titik diganti dengan PJU Pintar, maka akan bisa menghemat kira-kira 4,5 MW, itu tentunya bisa akan bisa menghemat anggaran tentunya per tahun tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat,” ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Jumat (24/01/2014).

Sistem PJU Pintar nantinya akan dipasang di kurang lebih 17.000 titik PJU kota Surakarta secara bertahap. Dengan adanya sistem ini, biaya listrik PJU dapat dihemat sampai 65%. Penghematan tersebut dengan jalan mengganti lampu yang terpasang saat ini

(misal merkuri) yang mempunyai efisiensi rendah dengan lampu yang efisiensi lebih tinggi (misal lampu HPS, LED, atau induksi). Penggantian ini diperkirakan dapat menghemat sampai dengan 50%. Penggantian dapat berupa dari lampu 400W ke 250W dan lampu 250W menjadi 125W dengan kualitas terang yang sama.

Penghematan anggaran yang ada dapat, dipergunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan infrastruktur yang lain, lanjut Susilo.

Dengan segala kelebihan dan keuntungan yang dihasilkan, Wamen mengharapkan program penghematan pemakaian listrik di jalan-jalan umum ini bisa diterapkan didaerah daerah lainnya.” Jadi ini merupakan program masa depan guna mengurangi pemakaian listrik untuk menghemat anggaran,” imbuh Susilo.

Provinsi DKI Jakarta merupakan target pemerintah untuk menghasilkan penghematan

dengan PJU Pintar karena jumlah titik yang menjadi target penghematan mencapai 400.000 titik lampu, berbeda jauh dengan di Kota Solo yang hanya sebanyak 17.000 titik.

Hasil ujicoba yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBT) menunjukkan, selama tujuh bulan penelitian didapat hasil bahwa penghematan dari Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.042 GWh/ tahun setara 2 triliun rupiah/tahun atau mengurangi beban puncak sebesar 466 MW.

Sistem PJU Pintar yang dipasang oleh Balitbang ESDM di Provinsi DKI Jakarta meredupkan lampu jalan pada pukul 23.00 hingga pukul 04.30 WIB, dengan mekanisme ini pemakaian daya akan berkurang hingga 30%. Apabila skema ini diterapkan pada seluruh PJU yang ada di DKI Jakarta, estimasi penghematan energi mencapai 183 GWh per tahun atau sebesar 169,78 miliar rupiah per tahun. (SF)

Sumber : www.esdm.go.id

Sesditjen Hadiri Ground Breaking Proyek-Proyek MP3EI Sulbar



Groundbreaking Proyek-Proyek pembangunan Sulawesi barat yang dihadiri Sesditjen Ketenagalistrikan Arief Indarto, Senin (10/2).

Senin (10/2), Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto menghadiri peletakan batu pertama (ground breaking) beberapa proyek pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Peletakan batu pertama proyek-proyek yang mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersebut dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, serta dihadiri beberapa Wakil Menteri terkait.

Dua proyek ketenagalistrikan yang diresmikan pembangunannya oleh Hatta Rajasa adalah Pembangunan PLTA Tumbuan dengan kapasitas 450 MW dan PLTU Belang Belang dengan kapasitas 2 x 25 MW. PLTU Tumbuan akan dikembangkan oleh PT Hadji Kalla dan PT Bukaka (Kalla Group), dengan investasi sebesar + Rp.17 Trilyun. Pembangunan PLTU ini dilakukan 3 tahap. Tahap I dengan kapasitas kecil 10 MW untuk mensuplai pembangunan konstruksi PLTA yang lebih besar, Tahap II sebesar 150 MW serta Tahap III sebesar 300 MW.

PLTU Belang Belang dikembangkan oleh PT Rekind Daya Mamuju sebagai Independent Power Producer (IPP) dengan nama proyek sesuai RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2012 – 2021 adalah PLTU Mamuju. PLTU ini berlokasi di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam Daftar Proyek-Proyek FTP II dengan kapasitas kontrak (2x25 MW) dan kapasitas terpasang (2x30 MW). Komposisi kepemilikan saham PLTU ini adalah PT Rekayasa Industri (89%), PT Rekadaya ElektriKA (10%), dan PT Navigat Energy (1%). Nilai investasi pembangunan PLTU Mamuju ini sebesar + US \$ 96 Juta.

Sebagai informasi, kebutuhan tenaga listrik Provinsi Sulawesi Barat saat ini dipasok dari 3 gardu induk 150 kV, yaitu Polewali, Majene dan Mamuju yang terinterkoneksi dengan sistem Sulawesi Selatan. Gardu induk tersebut mendapat pasokan dari pembangkit-pembangkit yang ada di sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Kapasitas ketiga gardu induk tersebut saat ini

sebesar 90 MVA. Sistem isolated yang belum tersambung ke sistem masih dipasok dari PLTD. Beban puncak seluruh Provinsi Sulbar adalah 47 MW yang meliputi beban puncak sistem dan sistem isolated tersebar.

Provinsi Sulawesi Barat dengan Mamuju sebagai ibukotanya merupakan daerah yang sedang berkembang. Kondisi ekonomi Sulawesi Barat dalam tiga tahun terakhir tumbuh mengesankan mencapai rata-rata 10,4%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2022, di Provinsi Sulawesi Barat direncanakan akan dibangun pembangkit kapasitas total hingga 734 MW yang akan tersambung ke sistem 150 kV sistem Sulselbar. Pembangkit tersebut adalah PLTU batubara 2x25 MW (proyek FTP2) yang akan dibangun oleh swasta dan PLTA Poko 117 MW serta PLTA Karama. (PSJ)

Penulis : Pandu Satria Jati B

Semua Masyarakat Terlistriki di Tahun 2020

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dari kiri ke kanan : Dirjen Ketenagalistrikan bertemu dengan perwakilan International Energy Agency (IEA), suasana wawancara kebijakan energi Indonesia oleh IEA, Dirjen Ketenagalistrikan didampingi para pejabat di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan dan Pusdatin ESDM.

Pemerintah optimis rasio elektrifikasi Indonesia dapat mencapai 99% di tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc dalam wawancara dengan International Energy Agency (IEA) di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/3). Hingga akhir tahun 2013, RE Indonesia mencapai 80,5%. Capaian ini meningkat sekitar 15% dalam empat tahun terakhir dimana RE tahun 2009 masih di angka 65,79%. Untuk itu pemerintah Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 5.000 MW setiap tahunnya. "Hal tersebut sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)" ungkap Jarman. Ia menambahkan bahwa RUKN disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang dibuat oleh masing-masing Provinsi di Indonesia. Dirjen Ketenagalistrikan mengatakan bahwa di tahun 2020 mendatang Independent Power Producer (IPP) menyumbang 43% kapasitas listrik nasional. "Saat ini kapasitas pembangkit listrik PLN sebesar 74 % dan IPP 22%, sisanya berasal dari PPU," ujar Jarman. Dalam kesempatan tersebut,

Jarman juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui kementerian ESDM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkit, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mengurangi kandungan karbondioksida dalam pembangkit listrik melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi keharusan para investor untuk membangkitkan listrik di Indonesia. Dalam jawaban yang disampaikan atas kuesioner IEA untuk Kementerian ESDM, terkait peraturan di sub sektor ketenagalistrikan, Jarman menjawab bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan listrik dikuasai oleh negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam UU ini, PT PLN (Persero) bukanlah pemegang lisensi tunggal untuk penyediaan listrik di Indonesia lagi. Penyediaan listrik untuk umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD), badan usaha swasta, koperasi, dan masyarakat mandiri yang bergerak dalam penyediaan

listrik. Perusahaan milik negara akan mendapat prioritas pertama untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat. Untuk wilayah yang belum dilayani oleh listrik, pemerintah atau pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk perusahaan daerah milik pemerintah, swasta, atau koperasi untuk melakukan penyediaan listrik terintegrasi. Dalam UU Nomor 30 /2009 tentang Ketenagalistrikan antara lain : pembagian area bisnis penyediaan listrik terpadu, tarif regional untuk wilayah bisnis tertentu, pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta perbatasan listrik lintas perdagangan. Sejak 2010 pemerintah meluncurkan Program Percepatan Pembangkit Listrik Tahap II (FTP 2). Dimana total kapasitas adalah 17.918 MW yang terdiri dari 1.803 MW PLTA, 4.965 MW PLTP, 10.870 PLTU dan 208 MW PLTG. FTP 2 memberikan porsi yang lebih besar untuk energi terbarukan serta teknologi ramah lingkungan dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. (PSJ)

Wamen ESDM Lakukan Softlaunching Proyek-Proyek Kelistrikan di Batam



Searah jarum jam : Wamen ESDM Susilo Siswoutomo mendapatkan pengarahan proyekproyek kelistrikan di Batam, penekanan sirine perserian, konferensi pers oleh Wamen ESDM dan Dirjen Ketenagalistrikan, sambutan Gubernur Kepulauan Riau.

Penulis : Pandu Satria Jati B

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo pada Sabtu (1/03) melakukan soft launching pembangunan 5 proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Batam Kepulauan Riau.

Proyek-proyek yang berlokasi di Tanjung Uncang ini antara lain pembangunan pipa gas ruas 2 pemping-Tanjung Uncang milik konsorsium PT PLN Batam dan UBE, PLTG Tanjung Uncang milik Independent Power Producer (IPP), PLTGU Tanjung Uncang milik PT PLN Batam, Gardu Induk (GI) Tanjung Uncang, dan Transmisi 150kV Sagulung-Tanjung Uncang.

Acara yang di laksanakan di lokasi proyek pembangunan di Kampung Taroka, Tanjung Uncang Batam ini juga dihadiri oleh Gubernur

Kepulauan Riau, Walikota Batam, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Deputy Pengendalian Komersil SKK-MIGAS, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direksi PLN Batam, dan para pejabat lainnya. Soft

launching 5 proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Batam di tandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri ESDM dan dilanjutkan dengan penanaman pohon.



Penanaman pohon sebagai simbol pelestarian lingkungan hidup di area proyek-proyek kelistrikan di Batam.



Penandatanganan prasasti peresmian proyek-proyek kelistrikan di Batam : pembangunan pipa gas ruas 2 pemping-Tanjung Uncang milik konsorsium PT PLN Batam dan UBE, PLTG Tanjung Uncang milik Independent Power Producer (IPP), PLTGU Tanjung Uncang milik PT PLN Batam, Gardu Induk (GI) Tanjung Uncang, dan Transmisi 150kV Sagulung-Tanjung Uncang.

Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menambah pasokan listrik di pulau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia itu. "Rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau harus ditingkatkan, caranya dengan mensuplai pulau-pulau kecil dengan gas engine, memakai PLTG, PLTD-nya dimatikan, jadi pembangkit tenaga diesel diusahakan diganti tahun ini atau tahun depan maksimum, tolong kasian ama Negara," ujar Susilo.

Sistem kelistrikan di Batam yang dikembangkan oleh Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Bright Batam, menurut Wamen ESDM dapat menjadi proyek percontohan nasional. " PLN Batam dapat menjadi model untuk wilayah lain-lainnya. Listrik disini sudah tidak disubsidi lagi, ibarat anak bayi sudah disapi, sudah tidak menyusui lagi kepada induknya," ujarnya. Susilo meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero)

untuk menerapkan system PLN Di Batam dapat diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Pembangunan 5 proyek ketenagalistrikan ini merupakan rencana strategis untuk menambah komposisi Pembangkit milik sendiri dalam rangka menyediakan kepastian ketersediaan dan keberlangsungan pasokan listrik di Batam, sehingga Batam sebagai kota industri semakin menarik investor untuk mengembangkan usahanya di Batam.



maket proyek-proyek kelistrikan di Batam yang diresmikan oleh Wakil Menteri ESDM, Sabtu (1/3).

Dengan dibangunnya proyek-proyek tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem kelistrikan di Batam, termasuk dari sisi ketahanan suplai energi primer untuk pembangkit, yang semula hanya bergantung terhadap satu sumber yaitu dari Grissik Sumatera Selatan, maka nantinya menjadi dua sumber yaitu dari Natuna, sehingga apabila dilakukan maintenance pipa, maka suplai gas bisa disalurkan dari sumber lainnya. (PSJ)

Wamen ESDM Meresmikan Pembangunan PLTA Kayan Kalimantan Utara berkapasitas 6.080 MW



Penandatanganan MOU PLTA Kayan (6.080 MW)

Wakil menteri ESDM Susilo Siswoutomo Sabtu (18/1) meresmikan pembangunan Proyek PLTA Kayan di Kalimantan Utara berkapasitas 6.080 MW yang dibangun oleh PT Kayan Hydro energi. Acara yang di pusatkan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, Pjs Gubernur Kalimantan Utara Irianto

Lambrie, Duta Besar Indonesia untuk RRC Sugeng Raharjo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan para pejabat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peresmian mulainya proyek PLTA Kayan di tandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri ESDM, Panglima TNI, Dirut PLN, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati

Bulungan Budiman Arifin. Bupati Bulungan dalam sambutannya mengatakan, proyek PLTA ini diharapkan dapat menjawab masalah kelistrikan yang ada di Bulungan selama ini, karena dari 81 desa di Kabupaten Bulungan, hanya 33 desa yang menikmati listrik secara 24 jam, 26 desa menikmati listrik 12 jam dan sisanya belum memiliki aliran listrik. Berdasarkan hasil survei potensi sumber air di Sungai Kayan sangat besar, sehingga jika proyek PLTA terwujud maka akan memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian secara luas. pembangunan, investasi, serta dapat membuka kesempatan kerja yang luas. "Jadi proyek ini adalah persembahan dari Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara untuk Indonesia." Tegas Budiman
Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang hadir pada acara ground breaking tersebut mengatakan bahwa TNI siap mengawal pembangunan PLTA Kayan sampai



Penyambutan Wakil menteri ESDM Susilo Siswoutomo saat tiba di lokasi pembangunan PLTA Kayan, Kalimantan Utara.



Foto-foto peresmian pembangunan proyek PLTA Kayan Kalimantan Utara yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, Pjs Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Duta Besar Indonesia untuk RRC Sugeng Raharjo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jerman dan para pejabat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah



Menurut Wamen ESDM, kapasitas 6.080 MW bukanlah kapasitas yang kecil, mengingat Indonesia sekarang ini memerlukan pembangunan 6.000 MW per tahun dalam jangka 10 tahun

selesai. Karena beliau sangat mengetahui kondisi masyarakat perbatasan di Kalimantan pada saat menjabat Asisten Operasi di Kodam VI Mulawarman. "Saya akan mengawal proyek ini, tidak boleh ada yang mengganggu. Yang mengganggu akan berhadapan langsung dengan panglima", ujarnya. Moeldoko juga berterima kasih kepada Kementerian ESDM, PLN dan BKPM karena telah mendukung proyek PLTA ini, karena pembangunannya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan. "Hari ini peletakan batu pertama merupakan suatu tonggak, bukan saja bagi Kaltara tapi semua rakyat Indonesia. Mengapa? Karena air merupakan salah satu potensi yang saat ini masih dianaktirikan. Jadi keinginan pemerintah untuk membangun listrik untuk rakyatnya bukan omong doang", ujar Wakil Menteri ESDM. Susilo mengatakan bahwa kapasitas 6.080 MW bukanlah kapasitas yang kecil, mengingat Indonesia sekarang ini memerlukan pembangunan 6.000 MW per tahun dalam jangka 10 tahun. Dalam satu tahun dibutuhkan dana sekitar 10 miliar USD, karena itu peran PT Kayan ini sangat penting untuk menyediakan listrik bagi kawasan ini dan lainnya.

Susilo juga mengaku bahagia karena melihat keberhasilan Pemda dan PT Kayan Hydro Energi membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar. Beliau juga berpesan agar pembangunan PLTA ini harus melibatkan Pemda dan masyarakat lokal. "Didik mereka, pekerjaan mereka, sediakan pekerjaan dan bantu masyarakat untuk membantu proyek ini", imbuhnya. (JFN)

Penulis : Jackson Frans

Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan Tahun 2013 – Ditjen Ketenagalistrikan

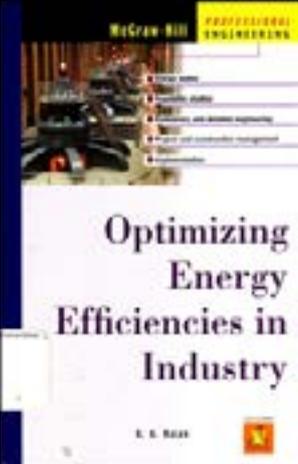
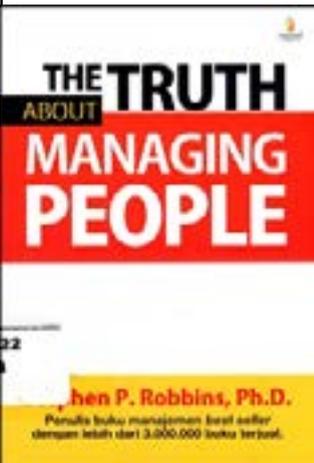
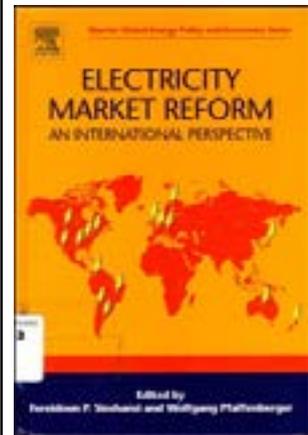
No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1	Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2013 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
2	Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2013 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota
3	Peraturan Menteri ESDM No.21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan
4	Peraturan Menteri ESDM No.35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
5	Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika
6	Peraturan Menteri ESDM No.38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
7	Keputusan Menteri ESDM No.2187 K/20/MEM/2013 Tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sebagai Lembaga {emeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
8	Keputusan Menteri ESDM No.3943 K/90/MEM/2013 Tentang Pengelolaan Museum Listrik Dan Energi Baru
9	Keputusan Menteri ESDM Nomor 4092 K/21/MEM/2013 tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2013 s.d. 2022

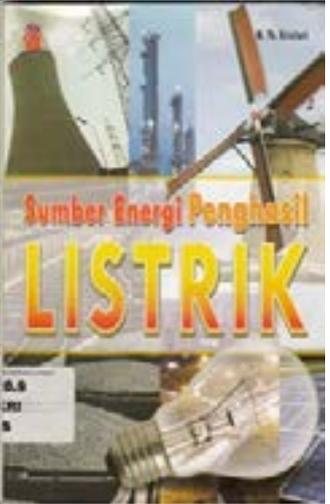
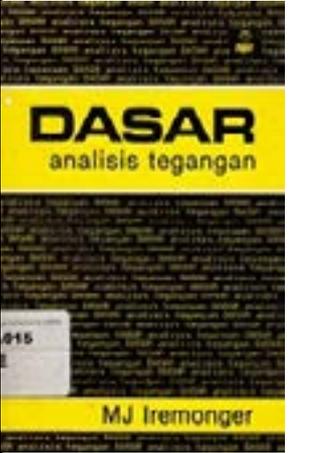
Sumber : Subbagian Informasi Hukum DJK



RESENSI BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN DJK

Sumber : Subbagian Informasi Hukum DJK

	<p style="text-align: center;">Optimizing Energy Efficiencies in Industry</p> <p>Meminimalkan biaya dan memaksimalkan efisiensi energi! dengan mengoptimalkan efisiensi energi dalam industry, Anda bisa melakukan itu. dalam halaman-halaman buku ini Anda akan menemukan wawasan praktis dan “aturan paling jitu” untuk menentukan kinerja energi-energi individual peralatan intensif serta sistem total. Ditulis oleh seorang spesialis dalam pengelolaan energi, mengoptimalkan efisiensi energi dalam industri secara menyeluruh menjelaskan prinsip-prinsip operasi dan teori-intensif energi peralatan, termasuk: pemanas, boiler, turbin, kompresor, pompa, dan banyak lagi.</p> <p>Anda juga akan menemukan sebuah kompilasi dari titik-titik kritis yang telah diterbitkan atau disajikan di nasional / internasional forum energi dan database untuk membandingkan kinerja peralatan, serta jangkauan ahli: audit energi, studi kelayakan, persiapan teknik, teknik rinci, pelaksanaan, proyek dan manajemen konstruksi, start up, aturan paling jitu untuk menentukan kinerja energi peralatan individu dan keseluruhan sistem.</p>
	<p style="text-align: center;">The Truth About Managing People</p> <p>Buku ini membahas 53 prinsip yang bisa digunakan untuk mengatasi setiap tantangan manajemen. Penulis utama buku-buku teks manajemen ini telah menyaring penelitian untuk menyaring kebenaran-kebenaran yang harus diketahui oleh stiap manajer. Adapun kebenaran-kebenaran yang diungkapkan dalam buku ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebenaran tentang membangun tim dan merancang pekerjaan berproduktivitas tinggi • Kebenaran tentang mengapa karyawan “bahagia” belum tentu lebih produktif • Kebenaran(kejutan) tentang perilaku seperti apa yang sebenarnya harus anda hargai <p>Dalam buku ini juga terdapat berbagai usulan dari sang penulis buku yang mampu membantu menerapkan informasi guna memperbaiki efektifitas manajerial. Di bagian belakang buku ini, juga disertakan dasar rujukan yang menjadi dasar tiap-tiap bab.</p>
	<p style="text-align: center;">Electricity Market reform: An International Perspective</p> <p>Inisiatif reformasi pasar listrik telah diimplementasikan di sejumlah negara, negara bagian dan propinsi di seluruh dunia, dimulai pada akhir 1980-an. reformasi ini, yang bervariasi dalam kompleksitas dan lingkup, telah bekerja cukup nyata, baik dalam beberapa kasus, mengakibatkan efisien, transparan dan kompetitif pasar grosir memberikan biaya yang lebih rendah untuk konsumen ritel. dalam kasus lain, hasilnya telah terbukti bermasalah untuk bencana.</p> <p>Dengan berlalunya waktu dan akumulasi bukti – bukti yang ada, para pembuat kebijakan, industri, peneliti, dan akademis semakin tertarik untuk mengumpulkan pelajaran-pelajaran berguna dari fakta-fakta tersebut ke dalam sebuah literatur tentang reformasi pasar listrik.</p> <p>Buku in membahas sebgain besar pasar listrik di seluruh dunia, mencoba memberikan jawaban yang definitif dalam satu volume. Dan point terpenting buku adalah menawarkan informasi yang paling komprehensif aktual dari ringkasan artikel tentang reformasi pasar listrik oleh beberapa pakar dan akademisi terbaik dari seluruh dunia.</p>

	<p style="text-align: center;">Sumber energi penghasil listrik/M. Th. Kristiati</p> <p>Listrik merupakan satu dari banyak kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat di negara manapun di dunia, termasuk Indonesia. Kebutuhan bahkan ketergantungan terhadap listrik akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi dan peradaban manusia.</p> <p>Di Indonesia listrik terutama dihasilkan dari energi batubara dan minyak dan gas bumi. Namun, kita ketahui bersama, ketiga sumber energi utama ini merupakan energi tidak terbarukan. Artinya, suatu saat nanti ketiga sumber energi tersebut akan habis karena telah dimanfaatkan. Sementara untuk memperoleh ketiganya kembali diperlukan waktu jutaan tahun. Energi tersebut di atas juga merupakan penyumbang gas CO2 terbesar dibanding sumber energi yang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mulai memikirkan penggunaan sumber energi lain yang dapat menghasilkan listrik, untuk menghemat energi fosil dan mengurangi dampak pemanasan global.</p> <p>Sesungguhnya Indonesia kaya beberapa sumber energi pembangkit listrik alternatif terbarukan, seperti energi panas bumi, matahari, air, angin, nuklir, dan biomassa yang belum banyak dikembangkan. Sebagai contoh, Indonesia kaya energi panas bumi karena berada pada "ring of fire", kaya energi angin karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, juga kaya sinar matahari sepanjang tahun karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Mengapa semua energi ini belum dimanfaatkan?</p> <p>Buku ini membahas tuntas mengenai energi listrik, baik dari asal mulanya hingga pemanfaatannya serta dampak positif dan negatif akan masing-masing sumber energi listrik.</p>
	<p style="text-align: center;">Dasar analisis tegangan/M.J. Iremonger; penerjemah, Sardy S.</p> <p>Pentingnya komputer adan pemrograman komputer tumbuh dengan pesat pad tahun-tahun terakhir ini. Pertumbuhan ini telah menyebar luas dan dipercepat oleh kemajuan mikrokomputer. Hampir semua insinyur memiliki, atau akan segera memiliki, mengakses fasilitas komputer karena mereka memerlukannya guna melihat hasil-hasil perhitungan sebagai suatu sarana sehari-hari yang lumrah.</p> <p>Perhitungan atau computing selalu ada dalam kurikulum semua universitas pada mata ajaran teknik, dan sebenarnya sering diajarkan pula di sekolah. Tetapi kebanyakan para mahasiswa sering mengalami kesulitan serta merasakan sebagai suatu subjek yang asing, karena diajar oleh ahli komputer atau ahlimatematika yang tidak mengaitkannya dengan persoalan-persoalan teknik yang tengah mereka hadapi. Terdapat sejumlah keuntungan yang dapat berkembang dari pertautan studi antara teknik dan perhitungan. Teknik dapat membantu perhitungan dengan jalan memperlihatkan kaitannya dengan latihan-latihan yang tersedia, sehingga dengan demikian cara pemrograman dapat dipelajari, dipraktikkan, serta dikembangkan. Terlihat bahwa perhitungan merupakan suatu aktivitas utama dan wajar buat para insinyur. Perhitungan dapat membantu insinyur, karena penyampaian yang jelas dan pengertian yang konsekuen dari persamaan dan prosedur teknik diperlukan agar dapat menulis sebuah pemrograman komputer yang berhasil. Pendekatan semacam ini dapat menuntun kepada suatu penerimaan yang menggairahkan terhadap perhitungan. Hal ini bernilai, tidak hanya buat para mahasiswa teknik tetapi juga buat insinyur praktek yang barangkali kepada mereka belum diajarkan perhitungan dan merupakan 'goresan kehidupan' pengalaman mereka.</p>

Buku ini memakai BASIC, sebuah bahasa pemrograman yang seringkali dikritik oleh para ahli komputer karena sifatnya yang kurang terstruktur. Untuk para insinyur, BASIC memiliki banyak keuntungan, tambahan pula telah tersebar luas sebagai suatu bahasa komputer mikro yang telah terpasang atau built in. Penggunaan pernyataan bahasa Inggris yang sederhana membuatnya mudah dipelajari serta diingat, hingga seorang insinyur dapat mengatasi hambatan-hambatan perhitungan awal dan kemudian dapat memakainya pada saat-saat yang diperlukan. Program-program BASIC secara cepat dapat dikembangkan karena tidak memerlukan rutin-rutin compiling, linking, dan editing (penyuntingan), suatu hal yang membantu para pemula dan ahli. Tambahan pula, BASIC memberi kesempatan mahasiswa untuk melengkapi suatu latihan pemrograman dalam tempo yang relatif singkat, misalnya di sore hari ataupun saat belajar, hingga menjaga perhatian serta kepercayaan dalam perhitungan.

Dasar analisis tegangan ditulis dengan pemikiran berlandaskan filosofi tersebut. Tujuannya untuk membantu para mahasiswa supaya menjadi mahir membuat program dalam BASIC dengan jalan menggunakannya secara aktual dalam topik-topik teknik yang penting. Tambahan pula hal ini memungkinkan mahasiswa menggunakan perhitungan sebagai suatu cara mempelajari analisis tegangan, karena menulis program adalah analog dengan belajar, agar perlu mengerti permasalahan pokok. Sejumlah program singkat yang terdapat dalam buku ini akan meyakinkan para insinyur yang sangat enggan terhadap kemudahan serta nilai perhitungan.

Bab 1 merupakan pengenalan terhadap BASIC. Bab 2 memperkenalkan analisis tegangan di tingkat prasarjana tahun pertama dan kedua. Bab 3 hingga 8 mengikuti urutan yang diajarkan analisis tegangan. Masing-masing bab mengandung ringkasan teori yang bersesuaian, contoh-contoh pengerjaan yang memuat program komputer serta sejumlah soal. Kandungan teori berguna sebagai suatu ringkasan 'catatan revisi', walaupun itu bukan sebagai komprehensif. Contoh-contoh pengerjaan ditempatkan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Suatu listing (cetak luaran) program diberikan, disusul oleh sebuah contoh keluarannya serta beberapa 'catatan program'. Catatan-catatan ini menjelaskan struktur program dan bagaimana memanfaatkan teori analisis tegangan. Program-program tersebut hanya membutuhkan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Program-program itu mencakup modifikasi atau perluasan program contoh serta penulisan program baru serta lengkap. Pembaca dapat belajar baik pemrograman BASIC maupun analisis tegangan dengan memahami contoh-contoh tersebut serta mencoba soal-soal. Secara formal, soal-soal tersebut dinilai tidaklah terlalu sukar, tetapi dua soal pertama dari bab 3 sampai 5 memerlukan sedikit keahlian.

KESIAPAN SEKTOR ENERGI

MENGHADAPI PELAKSANAAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

oleh Felix Rudianto

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 ASEAN Economic Community 2015

Pada tahun 1992 para pemimpin negara ASEAN yang saat itu masih terdiri atas 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam menyepakati Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) yaitu kesepakatan untuk menghapus tarif bea masuk seluruh produk dalam perdagangan antar-negara ASEAN kecuali produk barang tertentu atau dengan kata lain kesepakatan untuk membentuk pasar bebas di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, dalam KTT ke-2 ASEAN pada tahun 1997 para pemimpin negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi, yang kemudian pada tahun 2007 dalam KTT ke-12 ASEAN, disepakati untuk dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2015 dengan membentuk ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang akan diimplementasikan berdasarkan AEC Blueprint. Percepatan dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global antara lain dengan India dan China, dengan pertimbangan adanya potensi penurunan biaya produksi barang konsumsi sebesar 10 s.d. 20% sebagai dampak integrasi ekonomi dan peningkatan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional.

AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya-saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

1.1.1 Arus Bebas Barang

Dalam kerangka AEC, negara-negara ASEAN menyepakati jadwal penghapusan tarif bea masuk impor barang yang termasuk dalam kategori Inclusion List (IL), sedangkan barang yang termasuk dalam kategori Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) juga harus dimasukkan dalam IL sesuai jadwal. Indonesia memasukkan produk beras dan gula dalam daftar produk sensitif yang dijadwalkan masuk dalam kategori IL pada tahun 2015.

Negara	Tahun Penghapusan Tarif		
	60% Pos Tarif	80% Pos Tarif	100% Pos Tarif
ASEAN-6	2003	2007	2010
Vietnam	2006	2010	2015
Laos dan Myanmar	2008	2012	2015
Cambodia	2010	-	2015 (fleksibel hingga 2018)

Sumber: Kemendag

Tabel 1.1 Jadwal Penghapusan Tarif Bea Masuk Impor Barang yang Termasuk Kategori IL

Selain itu juga disepakati untuk membentuk sistem sertifikasi Rules of Origin untuk memastikan hanya barang yang diproduksi negara ASEAN yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, menghapus Non-Tariff Barriers, meningkatkan fasilitasi perdagangan, melakukan integrasi kepabeanan, dan membentuk ASEAN Single Window yaitu suatu sistem elektronik yang mengintegrasikan informasi dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar-sistem secara otomatis yang mencakup sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandar-udaraan dan sistem terkait lainnya.

1.1.2 Arus Bebas Jasa

Liberalisasi jasa (services) dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa antara lain peraturan yang diskriminatif di bidang perpajakan, perizinan, kualifikasi, jangka waktu menetap, kewajiban pendaftaran, kepemilikan properti dan lahan, serta pembatasan jumlah penyedia jasa, jumlah tenaga kerja, dan volume transaksi untuk 4 sektor jasa yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata pada tahun 2010, jasa

logistik pada tahun 2013, dan seluruh sektor jasa lainnya pada tahun 2015, dan menyepakati dan mengimplementasikan Nota Saling Pengakuan (Mutual Recognition Agreement) untuk jasa arsitektur, jasa akuntansi, jasa survei, dan jasa praktisi medis pada tahun 2008, dan jasa praktisi gigi pada tahun 2009.

1.1.3 Arus Bebas Investasi

Arus bebas investasi diimplementasikan dengan prinsip Non-Discriminatory yang dijabarkan dalam 2 prinsip turunan yaitu: (1) The Most Favoured Nation (MFN) Principle atau prinsip kesetaraan berupa perlakuan yang sama terhadap semua Modal Asing yang masuk ke wilayah suatu negara ASEAN; dan (2) National Treatment Principle (NTP) berupa perlakuan yang sama terhadap Modal Asing dan Modal Dalam Negeri, dalam hal ini penanaman Modal Asing harus dalam bentuk badan usaha yang didirikan sesuai hukum host country. Kedua prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.1.4 Arus Modal yang Lebih Bebas

Khusus untuk modal, ASEAN menyepakati hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas berupa pengurangan atas pembatasan-pembatasan arus modal karena keterbukaan yang sangat bebas berpotensi menimbulkan risiko yang mengancam stabilitas kondisi perekonomian suatu negara.

1.1.5 Arus Bebas Tenaga Kerja Trampil

Arus bebas tenaga kerja trampil akan memungkinkan warga negara ASEAN yang memiliki keahlian untuk bekerja di seluruh negara ASEAN tanpa hambatan yang didukung dengan adanya MRA untuk engineering services, nursing services, architectural services,

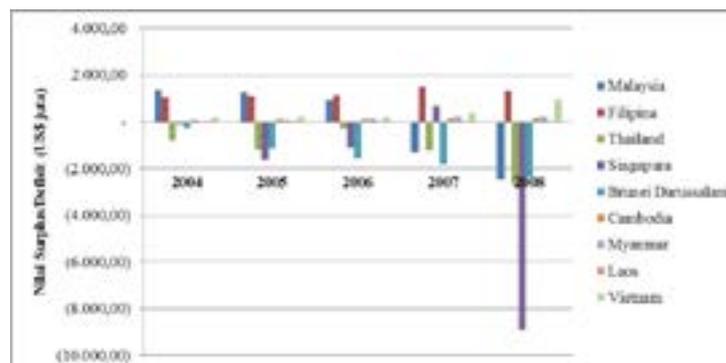
surveying qualifications, dental practitioners, accountancy services, dan good manufacturing practice inspection of manufacturers of medicinal products.

1.2 Dampak Pasar Bebas ASEAN

Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pasar Bebas ASEAN untuk kurun waktu 2004 s.d. 2008 yang ditampilkan pada Tabel dan Grafik berikut.

Negara	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Malaysia	1.334,10	1.282,77	917,42	-1.315,86	-2.489,74
Filipina	1.009,02	1.096,89	1.121,02	1.493,83	1.298,07
Singapura	-84,87	-1.635,33	-1.104,68	661,82	-8.927,44
Thailand	-795,35	-1.200,50	-281,93	-1.232,79	-2.673,01
Brunei Darus-salam	-263,48	-1.158,17	-1.569,38	-1.821,35	-2.356,95
Cambodia	70,72	93,20	102,59	120,60	172,02

Sumber: Kemendag dan BPS
Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara ASEAN



Grafik 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara ASEAN

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data pada periode 2004 s.d. 2008 pada kondisi belum terjadi pasar bebas penuh, terlihat bahwa Pasar Bebas ASEAN belum memberikan dampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk menghadapi diimplementasikannya AEC Tahun 2015 yang akan datang.

Salah satu hal yang perlu disiapkan tentunya adalah kemampuan penyediaan energi, khususnya tenaga listrik, sebagai faktor produksi yang penting dalam menentukan tingkat daya saing suatu produk barang. Pasokan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan harga

yang ekonomis akan menekan biaya produksi sehingga menghasilkan harga jual barang yang kompetitif dan memiliki daya-saing tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data pada periode 2004 s.d. 2008 pada kondisi belum terjadi pasar bebas penuh, terlihat bahwa Pasar Bebas ASEAN belum memberikan dampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk

menghadapi diimplementasikannya AEC Tahun 2015 yang akan datang.

Salah satu hal yang perlu disiapkan tentunya adalah kemampuan penyediaan energi, khususnya tenaga listrik, sebagai faktor produksi yang penting dalam menentukan tingkat daya saing suatu produk barang. Pasokan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan harga yang ekonomis akan menekan biaya produksi sehingga menghasilkan harga jual barang yang kompetitif dan memiliki daya-saing tinggi.

BAB II: BIDANG AMATAN DAN DATA

2.1 Kondisi Sektor

Ketenagalistrkan Beberapa Negara ASEAN

Untuk memberikan gambaran, pada Tabel 3.1 ditampilkan kondisi makro sektor ketenagalistrkan 4 negara ASEAN pada tahun 2010.

	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura
Populasi	237.641.326	28.251.000	92.337.852	5.076.700
Kapasitas Terpasang (MW)	33.103	27.179	16.359	10.261
Produksi (GWh)	168.382	125.045	67.743	44.097
Konsumsi (GWh)	147.297	104.519	55.266	41.021
Konsumsi listrik per kapita (kWh)	620	3.700	599	8.080

Sumber: Kementerian ESDM, Energy Commission Malaysia, Energy Regulatory Commission Filipina, dan Energy Market Authority Singapura

Tabel 2.1 Kondisi Sektor Ketenagalistrkan 4 Negara ASEAN

2.1.1 Indonesia

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrkan, sektor ketenagalistrkan di Indonesia menganut prinsip monopoli. Sampai dengan tahun 2013, pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya. Selain PLN, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi atau memiliki aset pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang juga beroperasi secara monopoli di kawasan industri, yaitu: PT Cikarang Listrindo yang memiliki wilayah usaha Kawasan Industri Jababeka di Kab. Bekasi, PT Krakatau Daya Listrik yang memiliki wilayah usaha Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon, PT Tata Jabar Sejahtera yang memiliki wilayah usaha Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Kab. Purwakarta dan Kab. Subang, PT Batamindo Investment Cakrawala yang memiliki wilayah usaha Kawasan Industri Batamindo di Kota Batam, serta PT Kariangau Power yang memiliki wilayah usaha Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan, namun demikian skala bisnisnya sangat kecil apabila dibandingkan

dengan PLN. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya, pemegang wilayah usaha dapat membeli tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP), dari pemegang wilayah usaha lainnya, atau dari pemilik pembangkit untuk kepentingan sendiri berupa excess power.

Pada tahun 2012 daya mampu pembangkit tenaga listrik PLN beserta anak perusahaan dan IPP mencapai 37.948 MW. Daya mampu PLN beserta anak perusahaan 28.086 MW, sedangkan daya mampu IPP 9.862 MW.

Data produksi tenaga listrik PLN berdasarkan energi primer pada periode 2008 s.d. 2012 dan data biaya bahan bakar PLN pada periode yang sama ditampilkan pada pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut.

	2008	2009	2010	2011	2012
GWh BBM	35,93%	28,97%	25,65%	29,32%	19,79%
GWh batubara	35,00%	35,76%	35,45%	38,50%	44,69%
GWh gas alam	17,10%	23,82%	24,31%	22,52%	26,12%
GWh panas bumi	2,87%	2,91%	2,58%	2,44%	2,38%
GWh air	9,10%	8,54%	12,02%	7,23%	7,03%

Sumber: PLN

Tabel 2.2 Penggunaan Energi Primer PLN

	2008 (Rp/ kWh)	2009 (Rp/ kWh)	2010 (Rp/ kWh)	2011 (Rp/ kWh)	2012 (Rp/ kWh)
Biaya BBM	2.110,15	1.396,70	1.605,35	2.243,73	2.391,72
Biaya batubara	248,69	366,77	337,02	348,79	396,02
Biaya gas alam	262,09	352,42	374,13	354,43	596,56
Biaya rata-rata bahan bakar	1.011,08	699,81	728,49	965,20	889,84

Sumber: PLN

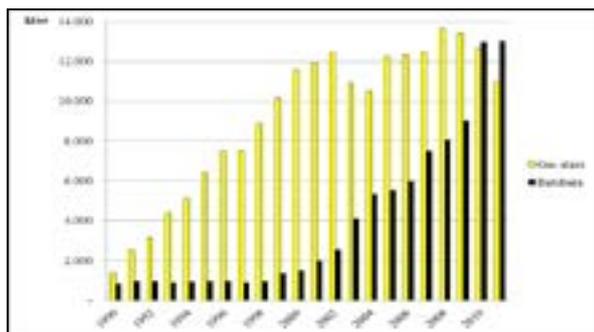
Tabel 2.3 Biaya Bahan Bakar PLN

2.1.2 Malaysia

Di Malaysia terdapat 3 perusahaan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, yaitu Tenaga Nasional Berhad (TNB) beroperasi di Semenanjung Malaysia, Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) beroperasi di Negara Bagian Sabah, dan Sarawak Energy Berhad (SEB) beroperasi di Negara Bagian Sarawak.

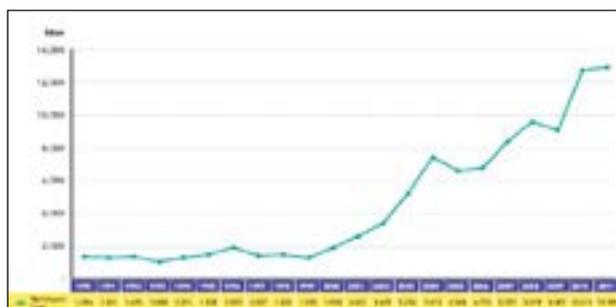
Pada tahun 2011, daya mampu pembangkit mencapai 24.371 MW, terdiri atas pembangkit berbahan bakar gas alam 12.806 MW (52,54%), pembangkit berbahan bakar batubara 7.521 MW (30,86%), pembangkit hidro 2.825 MW (11,59%), dan sisanya berbahan bakar BBM dan biomassa. Sampai dengan tahun 2009, produksi tenaga listrik menggunakan gas alam memiliki porsi paling besar, namun sejak tahun 2011 posisi tersebut digantikan oleh batubara, yang ditunjukkan oleh Grafik 2.1. Pada tahun 2011, produksi tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar batubara mencapai 46,6%, menggunakan bahan bakar gas alam sebesar 39,3%, menggunakan

bahan bakar BBM 7,5%, dan menggunakan tenaga air 6,6%. Kebutuhan batubara sebagian besar dipenuhi dari impor yang ditunjukkan oleh Grafik 2.2. Sampai dengan tahun 2007, harga gas alam untuk pembangkitan tenaga listrik ditetapkan pada harga RM 6,4/mmbtu, baru mengalami kenaikan pada tahun 2008 dan tahun-tahun berikutnya.



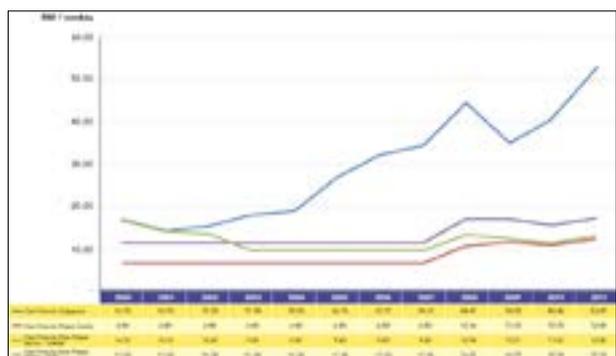
Sumber: Energy Commission Malaysia

Grafik 2.1 Volume Bahan Bakar untuk Produksi Tenaga Listrik Malaysia



Sumber: Energy Commission Malaysia

Grafik 2.2 Impor Netto Batubara Malaysia



Sumber: Energy Commission Malaysia

Grafik 2.3 Harga Jual Gas Alam Malaysia

2.1.3 Filipina

Filipina telah mengimplementasikan kompetisi terbatas dan unbundling di sektor ketenagalistrikan. Usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh perusahaan yang

berbeda. Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan oleh National Power Corporation (NPC), IPP yang memiliki kontrak dengan NPC, dan IPP yang menjual tenaga listrik kepada perusahaan selain NPC, usaha transmisi tenaga listrik dilakukan oleh National Transmission Corporation dan National Grid Corporation of the Philippines, usaha distribusi tenaga listrik dilakukan oleh banyak

perusahaan/koperasi, perusahaan distribusi dengan pangsa pasar terbesar adalah Meralco. Pengoperasian pasar tenaga listrik curah (Wholesale Electricity Spot Market) dilakukan oleh Philippine Electricity Market Corporation. Data produksi

tenaga listrik di Filipina berdasarkan energi primer pada periode 2008 s.d. 2012 ditampilkan pada Tabel 2.4.

2.1.4 Singapura

Singapura juga telah mengimplementasikan kompetisi terbatas dan unbundling di sektor ketenagalistrikan. Sebanyak 67% konsumen listrik yang merupakan konsumen industri, komersial, dan transportasi, merupakan contestable consumer atau dapat membeli tenaga listrik berdasarkan prinsip kompetisi di pasar tenaga listrik. Pembangkitan tenaga listrik dilakukan oleh 14 perusahaan, usaha transmisi tenaga listrik dilakukan oleh SP Power Assets, jasa penunjang pasar tenaga listrik dilakukan oleh SP Services, dan sebagai administrator pasar tenaga listrik dan operator sistem tenaga listrik adalah Energy Market Authority (EMA). Data produksi tenaga listrik di Singapura berdasarkan energi primer pada periode 2008 s.d. 2012 ditampilkan pada Tabel 2.5.

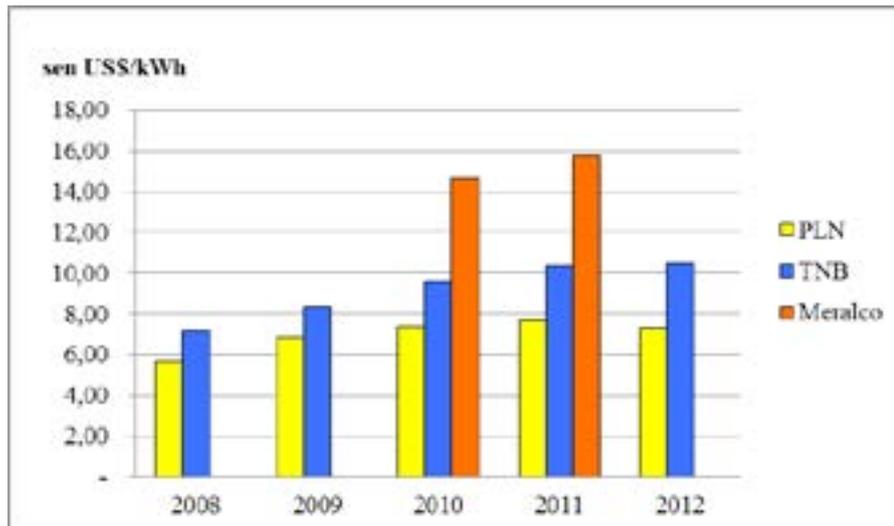
	2008	2009	2010	2011	2012
GWh BBM	15,40%	15,40%	18,70%	18,40%	12,30%
GWh gas alam	80,40%	80,60%	77,20%	78,00%	84,30%
GWh lain-lain	4,30%	4,10%	4,10%	3,60%	3,40%

Sumber: Energy Market Authority Singapura
Tabel 2.5 Penggunaan Energi Primer di Singapura

	2008	2009	2010	2011	2012
GWh BBM	8,00%	8,69%	10,48%	4,91%	5,83%
GWh batubara	25,89%	26,60%	34,40%	36,63%	38,76%
GWh gas alam	32,19%	32,11%	28,81%	29,77%	26,93%
GWh panas bumi	17,63%	16,67%	14,66%	14,37%	14,06%
GWh air	16,18%	15,80%	11,52%	14,02%	14,06%

Sumber: Energy Regulatory Commission Filipina
Tabel 2.4 Penggunaan Energi Primer di Filipina

2.2 Perbandingan Tarif Tenaga Listrik Konsumen Industri di ASEAN



Sumber: PLN, TNB, dan Meralco
Grafik 2.4 Tarif Konsumen Industri

BAB III: ANALISIS DAN PENJELASAN

3.1 Ketersediaan Energi

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga listrik Indonesia apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN relatif rendah. Konsumsi tenaga listrik per kapita berada pada kisaran 600 kWh, sebanding dengan Filipina, namun sangat jauh apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menarik, karena apabila dilihat neraca perdagangan pada Grafik 1.1, hanya dengan Filipina-lah, di antara negara-negara ASEAN-6, Indonesia memiliki neraca perdagangan positif. Konsumsi tenaga listrik Singapura dan Malaysia yang besar merupakan indikasi bahwa konsumsi tenaga listrik sektor industri dan komersial/bisnis lebih dominan daripada konsumsi rumah tangga. Peningkatan kebutuhan tenaga listrik, khususnya oleh sektor industri dan komersial/bisnis belum bisa diikuti karena banyaknya hambatan dalam pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik, salah satu contoh adalah kemunduran jadwal pembangunan proyek PLTU Jateng 2 x 1.000 MW yang semula dijadwalkan beroperasi pada tahun 2016, mundur menjadi tahun 2018 karena hambatan pembebasan

lahan sebagaimana diberitakan Kantor Berita Antara (www.antaranews.com/pengoperasian-pltu-jateng-mundur).

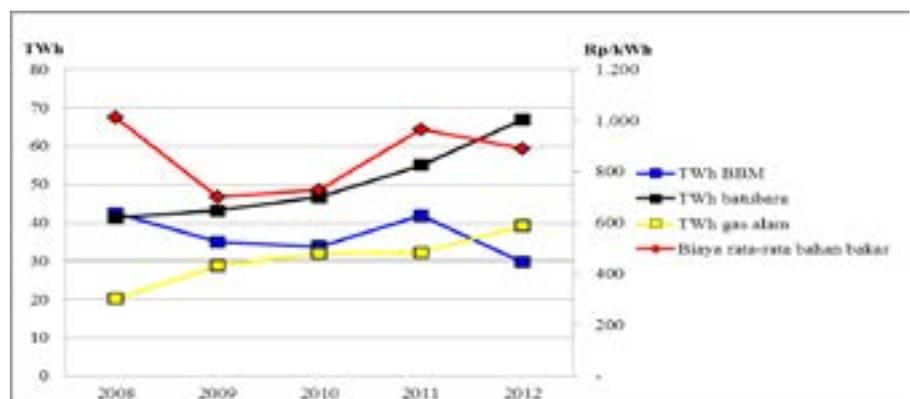
Dari sisi energy mix, komposisi energi primer PLN sebagaimana ditampilkan Tabel 2.2, menunjukkan kondisi cukup rawan yang ditandai dengan masih besarnya persentase penggunaan BBM, meskipun dari tahun ke tahun semakin menurun. Penggunaan batubara semakin meningkat seiring dengan selesainya Proyek 10.000 MW Tahap I, penggunaan gas alam berfuktuasi, sedangkan porsi energi terbarukan justru menurun. Pada tahun 2012 konsumsi BBM untuk pembangkit tenaga listrik tercatat sebesar 19,79% yang ekuivalen

dengan 8.214.794 kiloliter. Dengan kebutuhan BBM subsidi untuk sektor transportasi yang berada pada kisaran 40 juta kiloliter dan terus naik, sedangkan kemampuan produksi kilang dalam negeri hanya 40 juta kiloliter per tahun, maka impor BBM cenderung naik. Sementara, di Malaysia dan Filipina persentase penggunaan BBM kurang dari 10%, sedangkan di Singapura mencapai 12,30%. Kebijakan energy mix yang ditempuh Malaysia perlu dicermati karena adanya perubahan strategi, yaitu semula lebih banyak menggunakan gas alam, sejak tahun 2010 Malaysia lebih banyak menggunakan batubara yang sebagian besar diimpor, namun dengan harga lebih murah daripada gas alam. Di sini prinsip "to provide good quality energy at the lowest possible cost" telah digunakan.

Komposisi energy mix relatif ideal dimiliki oleh Filipina yang ditunjukkan dengan rendahnya penggunaan BBM yang mahal, penggunaan energi fosil masih dominan pada kisaran 65%, namun penggunaan energi terbarukan juga cukup besar mencapai 28%, sedangkan Indonesia baru memiliki visi akan menggunakan energi terbarukan sebanyak 25% dari konsumsi total pada tahun 2025.

3.2 Harga Energi

Sesuai data biaya bahan bakar pada Tabel 2.3 yang diplot dengan produksi tenaga listrik masing-



Sumber: PLN
Grafik 3.1 Produksi Tenaga Listrik vs Biaya Bahan Bakar PLN

masing bahan bakar sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, biaya bahan bakar PLN masih ditentukan oleh harga BBM, sehingga kenaikan volume dan biaya batubara dan gas alam tidak mempengaruhi tren penurunan biaya rata-rata bahan bakar.

Dengan demikian, cara yang ampuh untuk menurunkan biaya produksi tenaga listrik PLN adalah dengan mengurangi pemakaian BBM, dan menggantikannya dengan pembangkit berbahan bakar batubara atau gas alam.

Kebijakan Malaysia dalam hal penetapan harga gas alam juga perlu dicermati. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi pada harga gas alam, sehingga harga gas alam untuk pembangkit tenaga listrik hanya mengalami kenaikan sebesar sekitar 17%, semula RM 10,70/mmbtu (dengan kurs rata-rata RM 2,977/US\$, setara US\$ 3,59/mmbtu) menjadi RM 12,45/mmbtu (setara US\$ 4,18/mmbtu) pada tahun 2011 sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.3. Kenaikan harga yang tinggi dikenakan pada gas alam yang dijual ke Singapura yang mencapai 30%, semula RM 40,42/mmbtu (setara US\$ 13,58/mmbtu) menjadi RM 52,47/mmbtu (setara US\$ 17,63/mmbtu).

BAB IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Indonesia perlu terus meningkatkan ketersediaan energi, khususnya tenaga listrik, untuk menghadapi implementasi ASEAN Economic Community 2015 yang tinggal 1 tahun lagi. Defisit neraca perdagangan dengan negara-negara ASEAN-6 dan kondisi sektor ketenagalistrikan yang masih rentan dengan fluktuasi harga bahan bakar di pasar dunia harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah.

Meskipun negara-negara

ASEAN lainnya juga mengalami ketergantungan impor bahan bakar, misalnya Malaysia dan Singapura, Indonesia semestinya tidak mengalami hal serupa karena merupakan eksportir batubara terbesar di dunia dan memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Realisasi konsumsi batubara untuk pembangkit tenaga listrik PLN pada tahun 2012 “hanya” sebesar 35,5 juta ton, dibandingkan dengan realisasi ekspor batubara pada tahun 2012 yang mencapai 175,41 juta ton sesuai data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di sisi lain, pemanfaatan potensi energi terbarukan juga masih mengalami banyak hambatan. Namun demikian, peningkatan penggunaan batubara ataupun panas bumi perlu memperhatikan karakteristik PLTU batubara dan PLTP sebagai pemikul beban dasar, sehingga apabila faktor beban masih rendah atau terjadi perbedaan antara beban dasar dan beban puncak yang relatif besar, penggunaan PLTU batubara dan PLTP menjadi kurang optimal. Di sini diperlukan koordinasi antara PLN selaku produsen tenaga listrik dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana pengembangan wilayah, karena seringkali terjadi kondisi “lebih dulu telur atau ayam”. PLN biasanya menunggu adanya beban terlebih dahulu, sedangkan investor yang akan membangun industri menuntut adanya jaminan pasokan tenaga listrik terlebih dahulu.

Penggunaan teknologi pencairan atau gasifikasi batubara untuk menggantikan BBM atau gas alam juga bisa menjadi alternatif sumber energi dan perlu dipercepat implementasinya pada skala besar setelah bertahun-tahun hanya diimplementasikan pada skala laboratorium.

Sebagai penutup, prinsip “to provide good quality energy at the lowest possible cost” perlu menjadi prinsip

utama dalam penyusunan kebijakan energi dan terbukti bahwa prinsip tersebut dianut juga oleh negara-negara lain yang menjadi kompetitor Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan RI.
2. Amalia Adininggar Widyasanti, Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010.
3. W.D. Marsh, Electric Utility Power Generation Economics, Clarendon Press-Oxford, University Press, Ney York.
4. Statistik PLN 2012, PT PLN (Persero), 2013.
5. National Energy Balance 2011, Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission) – Kementerian tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia.
6. Electricity Supply Industry in Malaysia, Performance and Statistical Information 2011, Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission) Malaysia.
7. Annual Report 2012, Tenaga Nasional Berhad Malaysia.
8. Philippine Power Statistics 2012, Energy Regulatory Commission Filipina.
9. Annual Report 2012, Meralco Filipina.
10. Singapore Energy Statistics 2013, Energy Market Authority Singapura, 2013.

MONITORING PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 CHECK POINT B-12

Oleh : Hari Dwi Wijayanto (Perencana)

PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan prioritas Pembangunan Nasional, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan sekaligus sebagai penajaman program program RPJMN 2010 - 2014.

Dalam Instruksi tersebut, Presiden memerintahkan diantaranya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Laporan pelaksanaan prioritas Pembangunan Nasional tersebut akan disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pengawasan oleh UKP4 pada hakekatnya merupakan bagian dari amanah Presiden berupa pengawasan dan pengendalian pembangunan. Cakupan monitoringnya meliputi:

1. Menerjemahkan arahan Presiden;
2. Prinsip konsistensi-sinkronisasi Prioritas Nasional KIB-II dipegang benar, sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan;
3. Monitoringnya berfokus pada keluaran (output);
4. Tidak berpretensi sebagai auditor, melainkan penyaji fakta;
5. Menynergikan kepentingan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Dalam Instruksi Presiden ini, Kementerian ESDM melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang energi yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal



Gambar 1. Program Jaringan dan Gardu Distribusi Tahun 2013

Ketenagalistrikan sendiri memiliki Program Peningkatan Pasokan Listrik dan Program Listrik Murah yang pelaksanaannya dipantau oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sampai sejauh mana kemajuan pelaksanaan program-program pembangunan nasional tersebut.

Untuk tahun 2013 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bertanggung jawab atas 6 sub rencana aksi, yaitu :

1. Pembangunan transmisi
2. Gardu induk
3. Jaringan distribusi
4. Gardu distribusi
5. Listrik murah dan hemat
6. Fasilitasi program 10.000 MW

TARGET YANG DITETAPKAN

Ada 6 (enam) target yang telah ditetapkan sesuai dengan sub rencana aksi yang menjadi tanggungjawab yaitu :

1. Terlaksananya pembangunan/ penyelesaian transmisi listrik di seluruh Indonesia sepanjang 973 kms (APBN 2013) dan 976 kms (carry over 2010-2012).
2. Terlaksananya pembangunan gardu induk di seluruh Indonesia

dengan kapasitas sebesar 1.840 MVA (APBN 2013).

3. Terlaksananya pembangunan gardu distribusi di seluruh Indonesia sebanyak 217,5 MVA (APBN 2013).
4. Pembangunan jaringan distribusi di seluruh Indonesia sepanjang 9.256,74 kms (APBN 2013).
5. Tersedianya Listrik Murah dan Hemat untuk 16.204 RTS.
6. Terfasilitasinya kemajuan program 10.000 MW Tahap II (total 98 proyek) terdiri dari : 26 proyek PLN dan 72 proyek IPP melalui pelaporan berkala minimal setiap 6 bulan.

PROGRESS SAMPAI DENGAN B-12 (DESEMBER 2013)

1. Untuk sub rencana aksi transmisi :

Capaian 84,08 % (merah).

Total transmisi yang selesai yaitu 360 kms, terdiri dari transmisi Phi. Incomer Tanjung Api-api (112 kms) dan transmisi Asam-asam-batulicin (248 kms). Transmisi Phi. Incomer Tanjung Api-api telah siap komisioning yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2013 dan sudah energize tanggal 23 November 2013. Sedangkan transmisi Asam-

asam-batulicin telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2013.

- T/L Bonto-Bima-Dompu (144 kms): Pembebasan lahan 224/224 titik, Progress Pondasi 224/224 titik, Tower 223/224 titik, Row 222/223 span, dan Progress Stringing 114/126 kms. Permasalahan yaitu diantara tower T.6 - T.7 dan T.12 - T.13 sec. Bonto - Bima, clearance tidak memenuhi syarat. Tower di titik T.217 - T.218 sec. Bima - Dompu terkendala masalah ROW dan T.214 - T.221 belum distringing karena kendala ROW di antara T.217 - T.218.
- T/L Atapupu-Atambua (36 kms) dan T/L Atambua-Kefamenanu (150 kms): Pembebasan Lahan 311/341 titik, Pondasi 310/341 titik, Tower 307/341 titik, Row 276/340 span, dan Progress Stringing 148,09/180 kms. Permasalahan yaitu 32 titik berada di kawasan hutan belum bisa dikerjakan, karena ijin pinjam pakai dari dinas kehutanan belum terbit. T.01 s/d T.09 belum dapat dilakukan stringing karena ada permasalahan dengan suku kaliduk (suku setempat).
- T/L Bolok-Mualafa-naibonat-Nonohanis (196 kms): Pembebasan tanah 414/414 titik, Pondasi 414/414 titik, Tower 413/414 titik, Row 368/413 span, dan Stringing 171/232 kms. Telah diterbitkan Berita Acara Energize dan juga Rekomendasi Teknik Saluran Transmisi dari PLN Jaser tanggal 25 Oktober 2013 untuk ruas transmisi dari PLTU Bolok sampai dengan GI Maulafa sepanjang 14,374 kmr atau 28,748 kms.
- T/L Kuta-Sengkol-Paokmotong-Pringgabaya (158 kms) : Pembebasan tanah 208/208 titik, Progress Pondasi 208/208

- titik, tower 208/208 titik, Row 207/207 span, dan Stringing 141/141 kms. Permasalahan yaitu diantara tower T.15A - T.15B dan T.32 - T.33 sec. Sengkol - Kuta, clearance tidak memenuhi syarat sehingga diperlukan pembangunan tower baru.
- T/L Sambutan-Bontang (180 kms): Pembebasan tanah 245/245 titik, Pondasi selesai 240/245, Erection selesai 238/245, Row 229/244 span dan stringing 66/88 kms. Permasalahan yaitu adanya reroute dari T. 21 s.d T. 25 dikarenakan pemilik meminta harga tanah 1 Milyar, untuk saat ini dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi.
- T/L Palangkaraya-Sampit (344 kms) : Pembebasan tanah 450/495 titik, Pondasi selesai 495/495, Erection selesai 495/495, Row 450/495 span dan stringing 315/344 kms. Permasalahan yaitu Row dan stringing belum selesai karena adanya masalah sosial terkait kelengkapan surat kepemilikan lahan dan kesepakatan harga tanam tumbuh.
- T/L Muara Sabak (74 kms) : Pembebasan tanah 75/113 titik, Pondasi selesai 56/113 titik dan Erection selesai 46/113 titik. Permasalahan yaitu warga minta harga tinggi dan akan dilakukan pendekatan lebih intensif.
- T/L Muara Bulian-Sarolangun (170 kms) : Pembebasan tanah 73/248 titik dan Pondasi selesai 26/248 titik. Permasalahan yaitu warga minta harga tinggi dan akan dilakukan pendekatan lebih intensif.
- T/L Jatirangon II-Incomer (2 kms) : Progress baru sampai pada tahapan pembebasan tanah. Ijin Lokasi dan Tanah baru bebas bulan Mei 2013.
- T/L Asahimas II-Incomer (2 kms) : Pembebasan tanah 3/3 titik, pondasi selesai 2/3 titik,

dan Row 2/2 span.

- T/L 150 kV Sengkang -Siwa (132,96 kms) : Pembebasan tanah 188/193 titik, Pondasi selesai 170/193, Erection selesai 163/193, stringing 67/192 span. dan Row 95/192 span. Permasalahan yaitu Masih terdapat 5 lahan yang belum bebas dimana warga minta tapak tower digeser.



Gambar 2. Transmisi Tanjung Api-api dan Asam-batulicin

2. Untuk sub rencana aksi Gardu Induk :

Capaian 68,58 % (merah).

- 8 GI Telah selesai yaitu GI Manna, Fajar Surya Ext, Paniki New, GI Muara Bulian 2 lb, Betung 2 lb, Pangkal Pinang 4 lb, Muara Sabak, dan GI Kasongan) total 180 MVA.
- 18 GI (Sumbulussalam, Meulaboh, Pasir Pangaraian, Sarolangun, Sekayu, Tebing Tinggi, Gumawang, Kelapa, Koba, Tengawang, Malimping, Cilegon Baru II, Asahimas II, Pelabuhan Ratu Baru, Bontoala, Tallo Lama, Silae New, dan Tanjung Merah New) telah sampai pada tahapan pematangan tanah, pemesanan material, pekerjaan sipil, dan pemasangan elektro mekanik.
- 12 GI (Pangurusan, Blang Pidie, Negeri Dolok, Salak, Pasir Putih, Kawasan Industri Dumai, Bagan Siapi-api, Air Raja, Kijang, Sri Bintang, Tanjung Uban, dan Jati Rangon II) sampai pada tahapan pematangan tanah dan pemesanan material dan pekerjaan sipil.
- 2 GI (Kotacane dan Rengat) baru sampai pada tahapan

pemesanan material.

3. Untuk sub rencana aksi Gardu Distribusi :
Capaian 116,95 % (biru).



Gambar 3. GI Muara Sabak

Capaian sampai akhir desember yaitu penyelesaian pembangunan gardu distribusi sebesar 254,375 MVA.

4. Untuk sub rencana aksi Jaringan Distribusi :
Capaian 137,50 % (biru).



Gambar 4. Gardu Distribusi Lisdes Sumsel

Capaian sampai akhir desember yaitu penyelesaian pembangunan jaringan distribusi sebesar 12.728,03 kms.



Gambar 5. Jaringan Distribusi Lisdes Sumsel

5. Untuk sub rencana aksi Listrik Murah dan Hemat :
Capaian 547,34 % (biru).
Capaian sampai dengan akhir desember yaitu terpasangnya listrik murah dan hemat untuk 88.692 RTS.



Gambar 6. Listrik Murah Hemat Lisdes Jambi

6. Untuk sub rencana aksi Fasilitasi pembangunan program 10.000 MW Tahap II:
Capaian 100 % (biru).
Telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan dan telah disampaikan hasil laporan FTP II kepada Menteri ESDM tanggal 30 Desember 2013.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT

1. Satker UIP Ring Sumatera II :
 - Masih adanya permasalahan dengan warga terkait dengan proyek transmisi Muara Sabak dan Muara Bulian-Sarolangun.
 - Proyek yang belum selesai akan diajukan ijin perpanjangan multi years contract.
2. Satker UIP Ring Sumatera I :
 - Masih adanya permasalahan pembebasan tanah di gardu induk kotacane dan rengat.
 - Proyek yang belum selesai akan diajukan ijin perpanjangan multi years contract.
3. Satker UIP Kitring Kalimantan :
 - Masih adanya permasalahan di transmisi Sambutan - Bontang dan Palangkaraya - Sampit terkait ganti rugi tanam tumbuh

dengan warga.

- Ditargetkan 2 proyek transmisi dan GI Tengkwang yang belum selesai untuk dilanjutkan tahun 2014 ini.
4. Satker UIP Ring Jawa Bali :
 - jin lokasi dan tanah baru bebas bulan mei 2013, sehingga proyek Transmisi Jati rangan II dan Asahimas II harus segera dipercepat.
 - Proyek yang belum selesai akan diajukan ijin perpanjangan multi years contract.
 5. Satker UIP Kitring Nusa Tenggara :

Masih adanya permasalahan klaim dengan warga dan perijinan masuk kawasan hutan, antara lain di jalur transmisi Atapupu-atambua-kefamenanu.
 6. Satker UIP Ring Sulmapa :
 - Progress T/L 150 kV Sengkang-Siwa yang belum mencapai tahapan stringing.
 - Proyek yang belum selesai akan diajukan ijin perpanjangan multi years contract.

KESIMPULAN

Melihat dari progress sampai dengan check point B-12 (Desember 2013), hanya pekerjaan dari Satker Listrik Perdesaan yang mampu mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pekerjaan dari Satker UIP banyak terkendala pembebasan lahan dan permasalahan sosial dengan warga, sehingga berakibat pada pencapaian yang tidak sesuai. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena berakibat pada mundurnya target COD dan potensi subsidi yang bertambah karena banyak proyek yang terkendala.